

SKRIPSI

PELAKSANAAN *SMART GOVERNMENT* DI KABUPATEN SOPPENG



Disusun dan diusulkan Oleh:

IRFAN

Nomor Stambuk : 1056 1049 8814

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

Halaman Judul

PELAKSANAAN *SMART GOVERNMENT* DI KABUPATEN SOPPENG



Disusun dan diusulkan Oleh:

IRFAN

Nomor Stambuk : 1056 1049 8814

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

Halaman Persetujuan

PERSETUJUAN

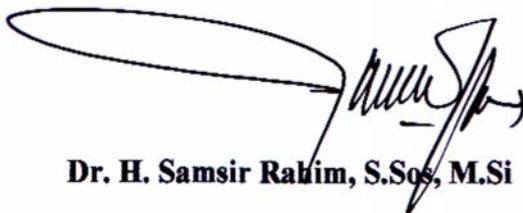
Judul Skripsi : Pelaksanaan *Smart Government* di Kabupaten
Soppeng

Nama Mahasiswa : IRFAN

Nomor Stambuk : 1056 1049 8814

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos, M.Si

Pembimbing II



Nasrul Haq, S.Sos, MPA

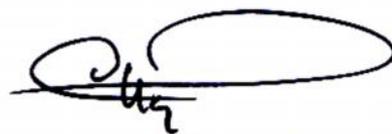
Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Unismuh Makassar



Dr. H. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara
Unismuh Makassar



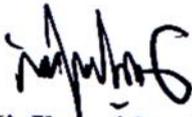
Nasrul Haq, S.Sos, MPA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor :1690/FSP/A.1-VIII/X/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Rabu tanggal 17 Oktober tahun 2018.

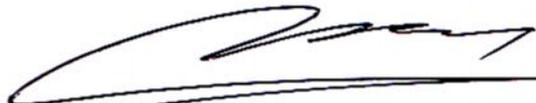
TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji :

1. Abdul Kadir Adys, SH, MM (Ketua)
2. Dr. Samsir Rahim, S.Sos, M.Si
3. Nasrul Haq, S.Sos, MPA
4. Nurbiah Tahir, S.Sos, M.AP



()
()
()
()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Irfan

Nomor Stambuk : 1056 1049 8814

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dar pihak lain atau telah dituliskan/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipn itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 17 Oktober 2018

Yang Menyatakan,



Irfan

ABSTRAK

Irfan. 2018 Pelaksanaan Smart Government di Kabupaten Soppeng
(dibimbing oleh Samsir Rahim, Nasrul Haq)

Pelaksanaan *smart government* merupakan langkah *smart* pemerintah Kabupaten Soppeng untuk meningkatkan layanan secara konsisten dengan memanfaatkan teknologi. Pelaksanaan *smart government* melibatkan pemerintah daerah dan beberapa SKPD di Kabupaten Soppeng, dengan mengambil dasar pada Perda Kabupaten Soppeng No. 15 tahun 2017 tentang "Penyelenggaraan Pelayanan Publik"

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan *online service* dan *open government* di Kabupaten Soppeng. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif dan menggunakan analisis deskriptif dengan wawancara interaktif, observasi dan studi literatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan *smart government* memanfaatkan teknologi *ethernet* untuk pemakaian internal dan menggunakan internet untuk diakses oleh masyarakat. Setiap SKPD memiliki website dan sosial media yang dikelola masing-masing SKPD, namun belum terintegrasi sepenuhnya ke Dinas Komunikasi dan Informatika. *Online service* berupa pelayan melalui aplikasi, dan nomor terpadu untuk kegawatdaruratan, *open government* melalui website dan sosial media. Impementasi pelaksanaan *smart government* pada tahun pertama yaitu pengadaan jaringan ke BKD dan absensi pegawai ASN dan pendirian *Soppeng Command Center* (SCC) serta target untuk tahun kedua ini akan dilakukan perluasan jaringan kekantor kecamatan dan tempat umum yang ada di kecamatan.

Kata Kunci: *E-Government*, *Smart Government*, Teknologi, Informasi, Soppeng

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum.wr.wb

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul “Pelaksanaan *Smart Government* di Kabupaten Soppeng”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini di susun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar sarjana sosial di Program Studi Administrasi Negara Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memiliki banyak kendala namun atas bantuan dan bimbingan beberapa pihak skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepadayang terhormat:

1. Dr. H. Ihyani Malik, S.Sos., M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos, M.Si dan Nasrul Haq, S. Sos., MPA selaku pembimbing yang senantiasa meluangkan waktunya memberikan masukan dan petunjuk dari awal penyusunan proposal hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. H. A. Kaswadi Rasak, SE selaku Bupati Kabupaten Soppeng beserta jajarannya yang telah menjadi responden yang memberikan banyak informasi dalam penyusunan skripsi ini.

4. Keluarga besar tercinta kepada kedua orang tua Tarmini dan Mawi, adinda Bripda. Fitri Nofitasari, Rezki Reza, dan kakanda Briptu. Herry Gerhan, S.Sos, yang senantiasa mendoakan dan memotivasi untuk menyelesaikan studi dan mencapai gelar sarjana.
5. Saudari Ns. Ayu Wulandari yang selalu berbagi pengalaman dan motivasi dalam proses perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini.
6. Saudara Ahmad Harye Sumitra Ishaq, Ahmad Khaeder Akram dan seluruh teman-teman kelas D ADN angkatan 2014 atas kenangan dan kesan kebersamaannya selama proses perkuliahan.
7. Seluruh pihak yang tidak disebutkan namanya dan ikut terlibat membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dibutuhkan oleh penulis. Semoga karya ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu administrasi publik.

Walaikumsalam.wr.wb

Makassar, 17 Oktober 2018



Irfan

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Bagan	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Konsep Pelaksanaan	7
B. Pelaksanaan <i>Smart City</i>	9
C. Konsep <i>Smart Government</i>	13
D. Kerangka Pikir	21
E. Fokus Penelitian	22
F. Deskripsi Fokus Penelitian	22
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	29
B. Jenis dan Tipe Penelitian	29
C. Sumber Data	30
D. Informan Penelitian	30
E. Teknik dan Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisa Data	33
G. Pengabsahan Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Karakteristik Wilayah Penelitian.....	35
B. <i>Online Service</i> dalam Pelaksanaan <i>Smart government</i> di Kabupaten Soppeng	40
C. <i>Open Government</i> dalam Pelaksanaan <i>Smart government</i> di	

Kabupaten Soppeng.....	51
D. Pelaksanaan <i>Smart Government</i> di Kabupaten Soppeng.....	62
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Informan.....	31
Tabel 4.2 Daftar SKPD Kabupaten Soppeng.....	39
Tabel 4.3 Daftar nomor layanan darurat	43
Tabel 4.4 Daftar website setiap SKPD Kabupaten Soppeng	56

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pikir	21
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Soppeng.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indikator tingkat kepuasan masyarakat salah satunya adalah efektivitas dan efisiensi pelayanan publik sehingga menuntut pemerintah untuk berinovasi menerapkan *electronic government (e-government)*. Pemeringkatan *e-government* dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) untuk menganalisis *e-government* dalam penilaian kinerja pemerintahan. Terdapat beberapa dimensi dalam memberikan penilaian yakni dimulai dari kebijakan. Setelah itu dilanjutkan dengan perencanaan. Kemudian yang berperan dalam penilaian adalah lembaga yang terkait. Selanjutnya infrastruktur terdiri dari internet/jaringan dan yang terakhir adalah aplikasi yang dibutuhkan dalam menganalisis *e-government* (Tampubolon, 2016).

Masyarakat dapat mengakses beragam informasi dengan mudah dan lebih efisien melalui teknologi yang berbasis aplikasi. Program tersebut adalah bagian dari implementasi *Smart City* (Utomo & Hariadi, 2016). *Smart city* didefinisikan sebagai konsep yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih efisien dan dapat terciptanya efektifitas interaksi antara pemerintah maupun staff pemerintah dengan warga secara intens. Penerapan teknologi informasi (IT) ini harus tepat sasaran untuk terwujudnya kota yang cerdas. Tata kelola IT sangat diperlukan dalam tata kelola *e-government*. Tanpa tata kelola IT yang baik, *e-government* tidak dapat terlaksana (Tampubolon, 2016).

Sebuah kota dikatakan kota *smart* apabila memenuhi enam dimensi diantaranya *smart people*, *smart mobility*, *smart economy*, *smart government*, *smart living*, dan *smart environment* (UGM, 2016). Implementasi *smart city* di kabupaten Soppeng telah mencoba untuk merujuk pada salah satu dimensi yaitu pada pelaksanaan *Smart government*.

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian sebelumnya didapatkan hasil dimana bahwa tata kelola IT yang telah berjalan di DKI Jakarta berdampak positif dalam peningkatan prestasi *e-government* tingkat provinsi. Hal tersebut sesuai dengan visi Jakarta dalam menciptakan konsep *Smart City* di Jakarta (Tampubolon, 2016). Selain DKI Jakarta kota-kota yang sukses menerapkan *e-government* diantaranya Kota Yogyakarta, Kota Makassar, dan beberapa kota kabupaten yang tersebar di wilayah NKRI. Dengan demikian hal tersebut dapat dikatakan *e-government* sudah menjadi kebutuhan dengan melihat kondisi perkembangan dalam dunia interaksi sosial yang serba menggunakan Teknologi Informasi.

Salah satu tindakan pemerintah Kabupaten Soppeng untuk mewujudkan visi dan misinya untuk menjadikan kabupaten Soppeng sebagai kabupaten terbaik adalah salah satunya dengan mewujudkan *smart government* merupakan langkah *smart* pemerintah kabupaten Soppeng untuk meningkatkan layanan secara konsisten dengan mengajak masyarakat memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang pesat di era ini (Eka, 2017). *Smart government* yang diimplementasikan di beberapa kota di belahan dunia dan telah terbukti berhasil menyelesaikan persoalan-persoalan secara cepat.

Pemanfaatan informasi ini untuk menciptakan kenyamanan, ketertiban dan keamanan serta *activitydailyliving*(ADL) yang lebih layak dan modern(Utomo & Hariadi, 2016).

Di Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat beberapa kota/kabupaten yang menerapkan *Smart government*, salah satu kabupaten tersebut adalah Kabupaten Soppeng. Hal tersebut diatur dalam Perda Kabupaten Soppeng no. 15 tahun 2017 Bab V tentang “penyelenggaraan pelayanan publik” bagian tujuh tentang sistem informasi pelayanan publik pasal 34 ayat (2).

Pelaksanaan *smart government* mencoba menerapkan sebuah inovasi pelayanan terpadu yang dinamakan *Soppeng Command Center* (SCC) bertujuan untuk efisiensi pelayanan dengan cara memantau kebutuhan masyarakat secara terpusat. *Soppeng Command Center* (SCC) memiliki beberapa fungsionalitas yang terdiri dari CCTV, *call center* dan kartu macca. Pertama, CCTV merupakan teknologi yang berfungsi untuk monitoring pelayanan masyarakat di instansi atau ruang publik untuk memaksimalkan penilaian kinerja. Kedua, *Call center* adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat pengaduan atau permintaan kebutuhan yang diinginkan yang bersifat *emergency* maupun *non emergency*. *Call center* terintegrasi dengan kepolisian, layanan medis atau rumah sakit, maupun pemadam kebakaran. Ketiga, ada Kartu Macca yang digunakan masyarakat untuk melakukan akses sarana kesehatan, akses pendidikan, hukum dan beras sejahtera (Eka, 2017).

Pada tahun 2015 inovasi pelayanan publik di Kabupaten Soppeng berbasis konsep pelayanan prima yang mengacu pada *standar operating procedure*

(SOP). Dengan pelaksanaan yang sesuai SOP diharapkan berjalan transparan dan pasti (Asriadi, 2015). Pelayanan publik pada saat itu belum menerapkan konsep *e-government*. Sedangkan secara global pada tahun 2015 perkembangan IT sudah sangat cepat serta adanya kanal-kanal aplikasi media sosial yang beraneka macam menjadi salah satu dari beberapa faktor kemajuan perkembangan IT yang tidak dapat dipungkiri.

Pengubahan suatu wilayah menjadi kota cerdas dengan pelaksanaan *smart government* dimulai pada awal tahun Kabupaten Soppeng 2017. Salah satu program yang mendukung pelaksanaan *smart government* adalah dengan diresmikannya Layanan Sistem Informasi dan Data Eletronik Berbasis Android (La Side) pada 30 November 2017 untuk mewujudkan pelayanan transparan, mudah, murah, pasti dan cepat serta terjangkau (Alimuddin, 2017). Program La Side salah satu dari beberapa konsep *smart government* yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Soppeng, dengan harapan dapat mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Soppeng yang semakin hari semakin melek teknologi informasi (IT).

Pelaksanaan *smart government* harus melibatkan banyak aspek yang saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. Di Kabupaten Soppeng, pelaksanaan *smart government* belum terorganisir dan berjalan dengan baik dikarenakan masih sangat baru sehingga peneliti berminat melakukan penelitian tentang Pelaksanaan *Smart government* di Kabupaten Soppeng.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah yang telah diuraikankan dan secara ringkas dari latar belakang tentang pelaksanaan *smart government* di Kabupaten Soppeng memberikan dasar bagi peneliti untuk merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *online service* di Kabupaten Soppeng?
2. Bagaimana pelaksanaan *open government* di Kabupaten Soppeng?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *online service* di Kabupaten Soppeng.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan *open government* di Kabupaten Soppeng.

D. Kegunaan Penelitian

1. Dibidang akademik

Dapat digunakan untuk mendapat data awal atau referensi dalam memberikan informasi kepada instansi terkait pelaksanaan *smart government* di Kabupaten Soppeng.

2. Pelayanan Masyarakat

Digunakan sebagai sumber informasi atau acuan dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan *smart government* di Kabupaten Soppeng yang dapat memudahkan masyarakat dalam berbagai hal terkait pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi yang disediakan oleh pemerintah.

3. Pengembangan Penelitian

Dapat digunakan sebagai landasan awal dalam pengembangan penelitian selanjutnya terkait pelaksanaan *smart government* di Kabupaten Soppeng.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pelaksanaan

1. Definisi Pelaksanaan

Menurut G.R Terry fungsi manajemen terdiri dari 4 yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* (Sukwiat, Jamal, & Sukanto, 2006). Terkhusus pada *actuating* atau pelaksanaan adalah tahap yang merupakan penerapan dari perencanaan yang sudah disepakati dan terorganisir dengan baik, kemudian dilaksanakan dengan melibatkan seluruh anggota dalam instansi untuk mewujudkan tujuan maupun cita-cita yang telah ditetapkan instansi tersebut. *Actuating* diartikan pula sebagai proses menggerakkan orang-orang agar memiliki keinginan untuk bekerja sama dengan penuh kesadaran dalam mewujudkan tujuan dengan efektif.

Pelaksanaan adalah implementasi dari keputusan sebelumnya telah disepakati dan ditetapkan dalam perencanaan. Pelaksanaan ialah proses ataupun cara menerapkan hasil dari perencanaan yang ditetapkan secara nyata/riil di lapangan untuk mencapai tujuan secara optimal (Arsana, 2016). Pelaksanaan kerja adalah prosedur, sistem operasi, dan metode yang tepat untuk melaksanakan pekerjaan secara tepat dan akurat (Sucoko, 2007).

2. Fungsi Pelaksanaan

Fungsi *actuating* adalah proses untuk menggerakkan anggota kelompok secara efektif dan efisien untuk bekerjasama dalam mencapai

tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Fungsi pelaksanaan yang lainnya adalah mewujudkan keseimbangan dalam tugas maupun hak dan kewajiban setiap individu dalam organisasi serta memotivasi terlaksananya efisiensi serta kebersamaan dalam mencapai tujuan (Arsana, 2016).

3. Tahap pelaksanaan

Tahap-tahap pelaksanaan dalam Sukiwat, Jamal & Sukanto (2006) dibutuhkan kecakapan dalam kepemimpinan antara lain :

- a. Komunikasi, artinya kemampuan seseorang untuk menumbuhkan rasa saling mengerti antara dirinya dengan orang lain. Tiga macam komunikasi
 - 1) Komunikasi ke bawah adalah komunikasi yang terjadi oleh pimpinan kepada bawahannya berupa pemberian petunjuk, instruksi, keterangan umum, perintah, teguran, atau pujian.
 - 2) Komunikasi ke atas adalah komunikasi yang terjadi oleh bawahan kepada atasan berupa laporan, keluhan, pendapat, atau saran.
 - 3) Komunikasi horisontal adalah komunikasi yang dilakukan dengan melibatkan anggota organisasi yakni untuk, dan dari anggota organisasi, dapat berupa pemeriksaan ulang secara bersama dan berturut-turut untuk memperoleh persetujuan.
- b. Motivasi yaitu langkah dalam pemberian dorongan kepada karyawan/pegawai agar mampu bekerja keras sehingga tujuan yang

ditetapkan organisasi dapat di capai dengan efisien. Berikut dua jenis motivasi :

- 1) Motivasi positif yang dimaksud adalah mempengaruhi orang lain/anggota dengan memberikan stimulus berupa *reward* untuk tingkat kepuasan tertentu.
- 2) Motivasi negatif yaitu langkah dalam mempengaruhi orang lain/anggota dengan hal negatif seperti menakut-nakuti. Misalnya : diturunkan pangkat atau di pecat.

c. Mengembangkan karyawan atau pegawai

Manajer bertanggungjawab untuk mengembangkan kemampuan bawahannya, memperbaiki sikap, menambah pengetahuan dan keahlian bawahan (Sukwiat, Jamal, & Sukamto, 2006).

B. Pelaksanaan *Smart City*

1. Definisi *Smart City*

Smart City berarti merujuk pada daerah kota/kabupaten dan provinsi yang pintar. Kata “*smart*” atau cerdas dalam konteks ini tidak bermakna memiliki intelektual (IQ) yang tinggi namun merujuk pada kota yang humanis dan ramah teknologi yang dihadirkan dalam pembangunan daerah untuk mewujudkan kehidupan kota atau daerah yang lebih kreatif sehingga layak ditinggali oleh penduduk (Habibie, 2016).

Smart City adalah sebuah kota yang dapat mengelola sumber daya alamnya (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) secara baik efektif dan efisien untuk mencapai, kenyamanan dan berkelanjutan. Untuk

mencapai hal tersebut, mengaktifkan *Information and communication technologies*(ICT) sangat dibutuhkan (Supangkat, 2015). Adapun tujuan dari adanya dari ICT yaitu untuk mengembangkan tingkat kualitas hidup masyarakat perkotaan, meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih efisien dan meningkatkan efektivitas interaksi pemerintah dan warga dengan menggunakan teknologi digital (IT)(Tampubolon, 2016).

Pemahaman *Smart City* sebagai kota yang sudah memanfaatkan teknologi informasi dalam mengintegrasikan seluruh infrastruktur dan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat, yang dilandasi dengan konsep dimensi utama yaitu teknologi, sumber daya manusia (SDM) dan pemerintahan (Esabella, 2016)

2. Perkembangan *Smart City* di Makassar

Perkembangan teknologi informasi sudah berkembang di wilayah Asia Tenggara dan di adopsi di Indonesia sejak tahun 2000. *Smart City* di *launching* pada tahun 2014 oleh Wakil Walikota Makassar saat itu, Ia adalah Moh Ramdhan Pomato. Makassar *Smart City* merupakan upaya yang di lakukan dalam mengembangkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan serta memaksimalkan penggunaan sistem teknologi informasi. Makassar *Smart City* mengalami modifikasi berupa penyempurnaan modul dan penambahan fitur sehingga terkesan lebih modern dan inovatif. Contohnya yaitu: e-puskesmas untuk layanan aplikasi kesehatan dan e-pemerintah untuk layanan pendeteksi posisi

pegawai pemkot dan *Geografis Information System* (Numa & Nawawi, 2016).

3. Dimensi dalam konsep *Smart City* .

Terdapat 6 dimensi yang dicapai oleh sebuah kota untuk mewujudkan *smart city* menurut Cohen (2014) dalam jurnal (UGM, 2016) yaitu :

a. *Smart People* (Masyarakat Penghuni Kota)

Ditinjau dari sisi *social and human capital*, *smart city* mempunyai warga kota yang berkualifikasi, mempunyai kemauan untuk selalu belajar, menerima perbedaan dalam bentuk apapun, kreatif, dan selalu berpartisipasi dalam kegiatan publik. Selain itu fleksibilitas juga telah menjadi bagian dari salah satu indikasi kuat dari masyarakat cerdas (Tampubolon, 2016).

b. *Smart Environment* (Lingkungan)

Ditinjau dari sudut pandang sumber daya alam (SDA), *smart city* harus memiliki daya tarik pemandangan dengan ciri yang atraktif. Selanjutnya bebas dari polusi udara ataupun polusi lainnya dan mempunyai sumber daya alam yang berkesinambungan (Tampubolon, 2016).

c. *Smart government* (Tata Kelola Pemerintahan)

Sisi pemerintahan terdiri dari kriteria indikator berikut: berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, melayani publik, dan bagian terpenting ialah birokrasi yang transparan dan tidak menyulitkan

masyarakat. Selain itu juga mempunyai strategi dan pandangan politik yang jelas dan bermanfaat bagi khalayak.

d. *Smart Economy* (Ekonomi)

Smart economy memiliki empat poin penting dalam penerapannya yaitu pusat perekonomian, pendidikan, industri atau perusahaan, dan sumber daya (Supangkat, 2015). Selain dari itu indikator dalam *smart economy* sebuah kota pintar yang meliputi: semangat berinovasi, berjiwa entrepreneur, mengupayakan produktifitas dan memiliki usaha untuk berubah. Karena perubahan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam pasar yang makin dinamis (Tampubolon, 2016).

e. *Smart Mobility* (Mobilitas)

Ditinjau dari sisi mobilitas terdapat kemudahan untuk mengakses menjadi sangat prioritas. Bukan hanya penduduk pribumi namun juga memudahkan bagi pendatang atau turis asing yang berkunjung ke kota tersebut. Selain itu, moda transportasi yang berkesinambungan, aman dan inovatif juga menjadi indikator tersendiri (Tampubolon, 2016).

f. *Smart Living* (Kehidupan)

Ditinjau dari segi kehidupan, hal inipun terdapat dalam poin indikator yakni fasilitas budaya tersedia, fasilitas mapun infrastruktur kesehatan dan pendidikan yang memadai, kehidupan sosial dapat berbaur (sosial interaksi berbasis digital), serta keamanan dan transportasi (Supangkat, 2015).

Smart government merupakan dimensi yang paling utama untuk diterapkan dalam pemerintahan karena merupakan pusat perhatian masyarakat yang sangat sensitif terkait kebutuhan utama masyarakat dalam mendapatkan pelayanan sehingga *impact of public service* dapat berupa peningkatan kepuasan masyarakat. Oleh karena itu penerapan *smart city* selalu diawali oleh dimensi *smart government*.

Aspek terkait *smart city* di Kabupaten Soppeng adalah mengenai tata kelola pemerintahan (*government*) yang sangat terkait erat dengan pelayanan publik. Pelayanan prima yang disuguhkan oleh aparatur pemerintahan menjadi sebuah kewajiban yang mutlak di era ini. Apalagi dengan kemajuan teknologi saat ini, ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat dengan cepat tersebar melalui media sosial maupun media lainnya. Upaya mewujudkan *smart government* yang akan memiliki *output* berupa peningkatan kualitas layanan publik dilakukan dengan berbagai cara. Adapun contohnya adalah Walikota Bandung mewajibkan semua pegawai memiliki media sosial seperti Twitter dan Instagram (Enceng & Hidayat, 2016).

C. Konsep *Smart Government*

Implementasi “Kota Cerdas” harus memiliki sebuah kerangka yang holistik (menyeluruh) dan utuh, agar apa yang dibangun sesuai dengan kebutuhan kota/kabupaten (Pongsapan, Rindengan, & Najooan, 2014). Pemerintah Kabupaten Soppeng memulai operasional *smart city* dengan menggunakan pendekatan *smart government* (Tata Kelola Pemerintahan).

1. Definisi *Smart government*

Smart government (Tata Kelola) yaitu sisi pemerintahan yang terdiri dari kriteria indikator berikut: berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, melayani publik, dan hal yang paling urgen adalah birokrasi yang transparan dan tidak menyulitkan masyarakat. Selain itu juga mempunyai strategi dan pandangan politik yang jelas dan bermanfaat bagi khalayak (Tampubolon, 2016).

Smart government adalah perbaikan layanan dengan mengedepankan penggunaan teknologi. Dalam *smart government* diperlukan adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Adanya keterlibatan masyarakat berupa pemberian saran, kritik dan masukan terhadap kinerja pemerintah. Sebelum adanya penancangan *smart city*, beberapa jenis layanan publik masih bersifat manual (Enceng & Hidayat, 2016).

2. Landasan Hukum untuk *Smart government* di kabupaten Soppeng

Acuan pemerintah kabupaten Soppeng dalam mewujudkan *smart government* merujuk pada:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng no. 15 tahun 2017 tentang “penyelenggaraan pelayanan publik”, pada bab II bagian ke 1 tentang maksud dan tujuan (Perda, 2017), terdapat pada:

- 1) Pasal 3 poin E

“Terwujudnya prinsip tata kelola pemerintahan yang baik” (Perda, 2017 : 5).

2) Pasal 3 poin F

“Terwujudnya kualitas pelayanan, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme” (Perda, 2017 : 5).

- b. Kemudian di perjelas pada Bab V tentang “penyelenggaraan pelayanan publik”, bagian tujuh tentang sistem informasi pelayanan publik sebagai berikut :

1) Pasal 33

Ayat (1) berbunyi :

“dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, diselenggarakan sistem informasi yang mudah diakses masyarakat”

Ayat (2) berbunyi:

“setiap informasi harus dapat diperoleh masyarakat dengan cara cepat, tepat, mudah dan sederhana” (Perda, 2017 : 16).

2) Pasal 34

Ayat (1) berbunyi :

“untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik penyelenggara dapat memanfaatkan teknologi informasi.”

Ayat (2) berbunyi:

“pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi alat bantu dalam melaksanakan transparansi dan melaksanakan akuntabilitas pelayanan publik untuk mewujudkan

tata kelola pemerintahan yang baik dalam kerangka pemerintahan elektronik (*e-government*)”(Perda, 2017 : 16).

c. Kemudian diperkuat oleh adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 2017 tentang “inovasi daerah”, tertuang dalam bab II tentang bentuk dan kriteria inovasi daerah. Bagian ke satu bentuk inovasi daerah pasal 4 inovasi daerah berbentuk:

- 1) “Inovasi tata kelola pemerintahan daerah”
- 2) “Inovasi pelayanan publik dan atau”
- 3) “Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah” (PP, 2017:5).

3. Kriteria dan tujuan pelayanan publik *Smart government*

Smart government merupakan tata kelola birokrasi *good government*. Tujuannya yakni untuk menciptakan manajemen birokrasi yang efisien, efektif, serta berjalannya fungsi pemerintahan daerah sebagai lembaga yang menjalankan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan bertanggungjawab (Habibie, 2016).

Pembentukan hukum dan kebebasan berpendapat dalam berdemokrasi diperlukan untuk menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan masyarakat. Rencana pemerintah dalam meningkatkan struktur pembangunan yang nyata, mengendalikan arus ekonomi, serta pengelolaan sumber daya juga merupakan upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mulai mengurangi import dan mulai memanfaatkan hasil bumi yang didukung dengan sumber daya manusia asli dari putra daerah.

Dan yang terpenting dalam menciptakan *smart government* adalah terbentuknya karakter pemerintah yang profesional, bertanggung jawab dan bersih (Mursalim, 2017).

Dalam penerapan *smart government* terdiri dari 6 bidang yaitu bidang pelayanan, bidang administrasi dan manajemen, bidang legislasi, bidang pembangunan, bidang keuangan dan bidang kepegawaian. Adapun bagian dari bidang pelayanan terdiri dari pelayanan kependudukan, pengaduan masyarakat, bisnis dan investasi, pendaftaran dan perizinan, perpajakan dan retribusi, publikasi info umum dan info pemerintahan (Fitriani.B, 2014).

4. Area Kerja *Smart government*

a. *Online Service*

Diantara bentuk penerapan *e-government* adalah *e-service* atau pelayanan publik secara *online*(Fitriani.B, 2014). Adapun indikator dari *online service* dalam (Scassa, 2014) terdiri dari :

1) *Online Procedure*

Online procedur merupakan informasi yang dapat diperoleh secara *online*. Informasi pemerintah tersedia secara elektronik dan terus di perbaharui (Hartina, 2017). *Online procedur* dengan kata lain informasi tentang syarat-syarat, langkah-langkah, dalam mengakses suatu layanan yang diinginkan melalui website maupun aplikasi *online*.

2) *Electronic Benefits Payments*

Kolaborasi lintas lembaga mayoritas informasi pemerintah dapat dibagi secara elektronik antar lembaga dan beberapa pihak. info yang tersedia untuk karyawan/pegawai pemerintah dan warga negara (dengan izin) dimanapun dan kapanpun (Hartina, 2017). Penerapan aplikasi pelayanan berbasis *online* untuk memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi dengan aparat pemerintah tanpa harus datang dan bertemu langsung dengan aparat (Widayat, Munandar, & Sumarto, 2017). Layanan yang dimaksud ialah layanan yang berkaitan dengan pembayaran apakah itu berupa pajak, retribusi, maupun biaya-biaya lainnya yang dapat ditransaksikan secara elektronik dengan menggunakan sistem lintas lembaga.

b. *OpenGovernment*

Open Government berfokus pada transparansi dan akuntabilitas. Selain itu *open government* berusaha untuk meningkatkan partisipasi warga dalam pemerintahan melalui berbagai bentuk keterlibatan baru, beberapa di antaranya media sosial. *Open government* juga berusaha untuk mempromosikan inovasi dan pertumbuhan ekonomi, data dalam format digital sehingga dapat diakses kembali dengan mudah (Scassa, 2014). Transparansi membawa esensi kebaikan ke dalam kehidupan publik seperti keadilan, bidang yang dimainkan, aturan hukum. Kebaikan ini memberikan manfaat untuk memberikan layanan dengan

tidak ada diskresi, tidak ada korupsi. Hak-hak warga dengan teknologi informasi, hak untuk mengetahui mengapa keputusan tertentu diambil. Penggunaan teknologi informasi dapat mempercepat penyebaran informasi melalui penggunaan website atau portal yang digunakan untuk membuat keputusan, dan opini (Scassa, 2014).

Adapun indikator dari *open government* terdiri dari :

1) *Open Data*

Keterbukaan data adalah komponen *Open Government* yang paling baik digunakan untuk mendukung inovasi dan pembangunan ekonomi dalam mencapai tujuan.

Seperangkat set data yang bernilai tinggi dibuat tersedia untuk umum. Kebijakan untuk penyimpanan dan perlindungan data ditetapkan. Data yang berarti seperangkat data bernilai tinggi, ditambah set data tambahan yang lebih mudah untuk ditemukan dan digunakan. Data yang dimasukkan ke dalam konteks untuk pemahaman dan penggunaan yang lebih baik (Hartina, 2017).

2) *Open Apps*

Keterbukaan aplikasi bisa memberikan kemudahan dengan data kontekstual lebih mudah untuk di akses dari lokasi manapun dan kapan pun. Pemerintah proaktif menyiarkan informasi kepada masyarakat yang diduplikatnya melalui teknologi seperti ponsel, dan lainnya (Hartina, 2017). Aplikasi yang dimaksud adalah aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan layanan yang bersifat data

terpusat sehingga memungkinkan pemerintah daerah hanya sebagai penghubung untuk membuka akses lebih mudah untuk di temukan oleh pengguna layanandan aplikasi-aplikasi produk asli daerah dengan fitur pemberian pelayanan maupun keperluan informasi data-data umum terkait keterbukaan dan transparansi pemerintah daerah.

3) *Privacy* (keamanan)

Konsep privasi sebagai bagian dari otonomi dan integritas. Privasi individu dipandang penting sebagai kemampuan untuk bertindak secara mandiri dan bebas dari gangguan oknum yang tidak memiliki kewenangan dari negara. Privasi juga merupakan bagian dari perlindungan atas penggunaan hak individu sebagai sasaran pemberian layanan serta sebaliknya menjadi kerangka tanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan secara elektronik.

Masyarakat dapat memperoleh data dengan cepat, dan proaktif mendorong data yang relevan, data yang unik kepada masyarakat berdasarkan profil mereka masing-masing (Hartina, 2017).

5. Kendala Penerapan *Smart government*

Hasil analisis terhadap penerapan *smart government* dalam jurnal yang dituliskan (Enceng & Hidayat, 2016) memperlihatkan beberapa kendala yang dihadapi yaitu:

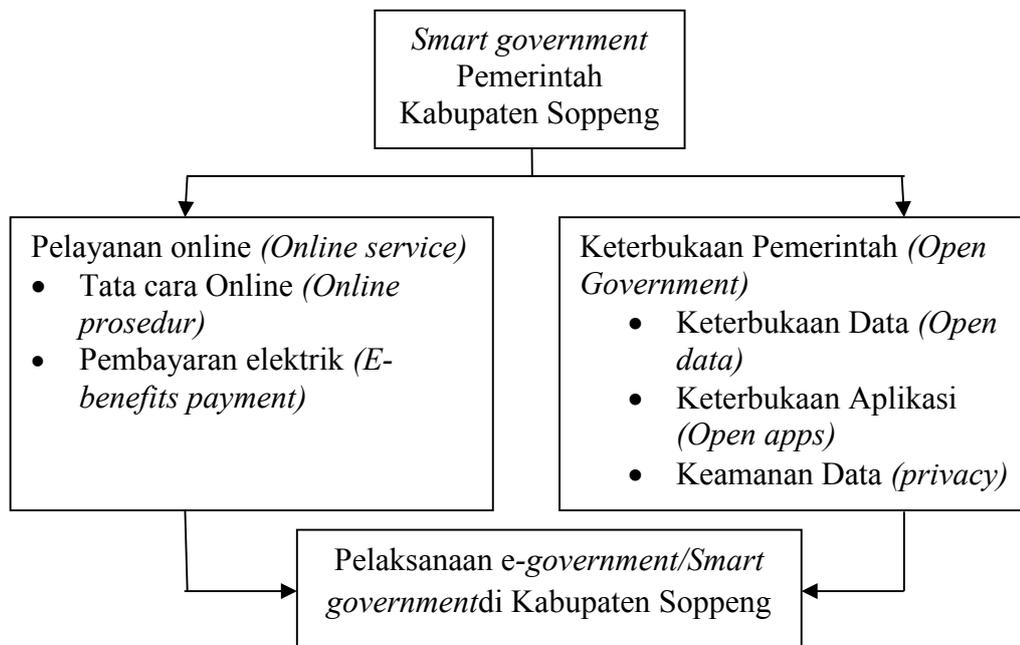
a. Keterbatasan jaringan internet, Kapasitas jaringan internet menjadi kendala pada awal implementasi program *smart city*.

b. Kesiapan SDM

Persiapan peluncuran program *smart city* tidak disertai kesiapan SDM di bidang *smart government*. Kemunculan berbagai aplikasi baru seringkali tidak disertai komitmen dan kesiapan SDM itu sendiri.

D. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis konsep dari pelaksanaan *Smart Government* di Kabupaten Soppeng, dengan itu sebagai titik ukur dalam pelaksanaannya, berikut dua indikator menurut Boyd Cohen yang sesuai dengan fakta yang ada di lokasi penelitian sehingga mejadi pendukung dan poin penting terhadap kerangka pelaksanaansmart governmentdi Kabupaten Soppeng, maka digambarkan dengan pola sebagai berikut :



Bagan 2.1
Kerangka Pikir

E. Fokus Penelitian

1. Pelaksanaan *online service* di Kabupaten Soppeng
2. Pelaksanaan *open government* di Kabupaten Soppeng

F. Deskripsi Fokus Penelitian

1. *Online service* (pelayanan online)

Pelayanan online pemerintah Kabupaten Soppeng adalah sistem pelayanan pemerintah yang berbasis elektronik melalui jaringan internet dengan tujuan memberikan layanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Berikut bagian dari indikator *Online service* terdiri dari :

a. Tata cara online (*Online Procedure*)

Tata cara online (*Online procedur*) yang dimaksud adalah tentang syarat-syarat untuk mendapatkan layanan online yang dapat berupa pengimputan data awal pengguna (id akses) dan pemahaman tentang ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh pengguna layanan dalam mendapatkan pelayanan online sesuai dengan yang dibutuhkan. Pelayanan online dikemas dalam bentuk website, dan aplikasi oleh pemerintah kabupaten Soppeng.

b. Pembayaran elektrik (*e-payment*)

Setelah adanya berbagai macam bentuk akses pelayanan online selanjutnya pemerintah Kabupaten Soppeng memberikan kemudahan terkait pembayaran dengan sistem *e-payment*. *E-payment* adalah kemudahan pembayaran yang dapat dilakukan secara elektronik tanpa melibatkan kontak langsung dengan petugas seperti datang

langsung dan membayar secara *cash* atau tunai. Hal ini dilakukan untuk mengurangi peluang terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam hal transaksi. Pembayaran yang dimaksud adalah dapat berupa pajak, retribusi dan biaya-biaya administrasi lain.

Berikut program layanan yang dapat diakses dengan cepat oleh masyarakat di Kabupaten Soppeng :

- a. Program SCC (*Soppeng Command Centre*) merupakan pusat pelayanan masyarakat untuk menciptakan layanan cepat dan tepat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Soppeng. Bentuk pelaksanaan SCC ini terdiri dari pengadaan CCTV untuk *monitoring room*, pusat komunikasi masyarakat dengan petugas pemadam kebakaran, rumah sakit serta operator SCC.
- b. Program pemberian bantuan dengan metode kartu terintegrasi yang di namakan kartu macca. kartu macca memiliki fitur yang unik yakni dapat diakses melalui website *www.kartumacca.id* namun hanya dapat diakses secara mendalam oleh pemegang kartu tersebut untuk melihat informasi bantuan yang diterima si pemegang kartu. Kartu tersebut khusus diberikan kepada masyarakat kurang mampu.
- c. Layanan perizinan oleh dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dapat diakses menggunakan aplikasi yang bernama layanan sistem informasi dan data eletronik berbasis android disingkat (LaSIDE) yang bertujuan memudahkan, mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang

cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau bagi masyarakat dan pelaku usaha.

2. Pelaksanaan *smart government* terkait *open government* di Kabupaten Soppeng adalah keterbukaan pemerintah dalam pemberian layanan dengan menggunakan sistem transparansi dan akuntabilitas.

- a. *Open Data* (Keterbukaan Data)

Open data merupakan keterbukaan pemerintah Kabupaten Soppeng tentang data-data yang bernilai tinggi dapat berupa informasi tentang profil instansi, informasi data tentang pelaporan transparansi keuangan, data kependudukan, informasi data tentang hukum, informasi tentang pemanfaatan dan pemberdayaan sumber daya manusia, sumber daya materi, sumber daya alam, serta informasi data tentang kegiatan dan kinerja instansi. Data data tersebut dapat diakses dengan mudah, cepat dan murah dikemas dalam bentuk website, blog, maupun aplikasi. Berikut media yang dapat diakses berkaitan dengan keterbukaan data pemerintah Kabupaten Soppeng :

- 1) Laman website resmi pemerintah Kabupaten Soppeng <https://Soppengkab.co.id> dengan berbagai fitur pelayanan informasi dan data didalamnya, yang dikelola oleh dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Soppeng
- 2) Website PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah) Kabupaten Soppeng <http://ppid.Soppengkab.go.id> oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng

- 3) Laman resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng <https://disdukcapilSoppengkab.co.id>
- 4) Laman website resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng <http://disdik.Soppengkab.co.id> dan Website, Soppeng.siap.web.id merupakan website yang dikembangkan oleh Telkom Indonesia yang merangkum seluruh data pada dinas pendidikan yang ada diseluruh Indonesia untuk mengakses informasi tentang pendidikan yang terkoneksi dengan data pada dinas pendidikan di seluruh Indonesia. Didalamnya berisi aplikasi-aplikasi terkait dengan pendidikan.
- 5) Laman website resmi Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng <https://distan.Soppengkab.co.id>
- 6) Laman website resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng <http://disbudpar.Soppengkab.co.id>
- 7) Laman website resmi Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Soppeng <http://nakertrans.Soppengkab.co.id>
- 8) Website <https://samp.Soppengkab.go.id> memberikan informasi tentang laporan absensi pegawai diseluruh SKPD Kabupaten Soppeng
- 9) Laman website BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Soppeng <https://bkpsdm.Soppengkab.co.id>

10) Laman blog Dinas Sosial Kabupaten Soppeng dinsoskabSoppeng.blogspot.com dan website program pemberian bantuan dengan metode kartu terintegrasi yang di namakan kartu macca. kartu macca memiliki fitur yang unik yakni dapat diakses melalui website www.kartumacca.id namun hanya dapat diakses secara mendalam oleh pemegang kartu tersebut untuk melihat informasi bantuan yang diterima si pemegang kartu.

b. *Open Apps* (Keterbukaan Aplikasi)

Open Apps merupakan ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat dalam hal, khusus informasi tentang transparansi dan akuntabilitas pemerintah Kab Soppeng yang diakses melalui berbagai macam aplikasi yang disediakan. Baik aplikasi yang terintegrasi dengan website maupun aplikasi versi mobile (aplikasi berbasis *smart phone*). Berikut hasil analisa awal peneliti :

- 1) Aplikasi SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian) memberikan informasi tentang data kepegawaian yang ada di Kabupaten Soppeng, yang dikelola oleh BKD (Badan Kepegawaian Daerah).
- 2) Aplikasi SIA (Sistem Informasi Absensi) memberikan informasi tentang laporan absensi pegawai diseluruh SKPD Kabupaten Soppeng.
- 3) Aplikasi LaSIDE adalah aplikasi berbasis *smart phone* yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (DPM & PTSP) dalam hal pemberian pelayanan perizinan secara terpadu dengan memberikan kemudahan akses informasi kepada pemohon dalam mengetahui langkah, syarat-syarat, maupun biaya dalam sebuah perizinan.

- 4) Aplikasi PADARE adalah aplikasi berbasis *smart phone* yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berisi tentang persyaratan PBB, pengaduan pajak, informasi SPPT, informasi pembayaran PBB, dan pelaporan penerimaan pajak.
- 5) Aplikasi yang dibawah oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) didalamnya mengelola laman/aplikasi berikut, LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) khusus pelayanan *e-tendering*, TEPR Ae-monev (Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran) khusus mengenai transparansi keuangan daerah, dan aplikasi SIRUP (Sistem Rencana Umum Pengadaan).
- 6) Tersedianya akun-akun aplikasi media sosial resmi pemerintah Kabupaten Soppeng yakni, *Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, dan Google Plus*.

c. *Privacy* (keamanan data)

Keamanan yang dimaksud adalah keamanan terhadap bentuk-bentuk penyalahgunaan data, pemalsuan dan sampai pada keamanan terhadap peretasan data (*heacker*) terhadap data pengguna dan data penyedia layanan dalam aktivitas akses informasi dan transaksi

elektronik yang mutlak sehingga mampu memberikan perlindungan secara teknis dan konstitusional.

Secara konstitusional privasi dalam aktivitas penggunaan informasi dan teknologi diatur dalam undang-undang no. 19 tahun 2016 tentang perubahan undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 26 ayat 1 & 2, dan aturan keamanan secara teknis diatur sesuai dengan kewenangan lembaga atau badan yang menjalankan sistem, namun tetap merujuk pada aturan perundang-undangan sebagai dasar pemikiran.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penyusunan proposal penelitian dimulai tanggal 13 Oktober 2017.

Adapun penelitian ini sudah dilakukan dari 1 Juli 2018 sampai dengan 1 September.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng sebagai pelaksana fungsi pengambilan keputusan tentang kebijakan *smart government* dan Dinas komunikasi dan informatika sebagai pelaksana teknis perangkat-perangkat pendukung *smart government* serta BPKD sebagai salah satu SKPD yang menerapkan *smart government*

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, masalah atau *core problems* penelitian masih samar-samar bahkan gelap kompleks dan dinamis.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini yaitu fenomenologi yang mana menggambarkan secara sistematis fenomena atau fakta namun tidak menganalisa fenomena itu terjadi.

Penelitian ini berfokus pada penemuan fakta mengenai pelaksanaan *smart government* di Kabupaten Soppeng. Hasil penelitian ini akan menggambarkan secara sistematis konsep kebijakan pemerintah sebagai *smart government* yakni pelaksanaan *online service*, dan *open government* di Kabupaten Soppeng.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder, diuraikan sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer yaitu data diperoleh dari orang pertama dan didapatkan secara langsung tanpa perantara. Pengumpulan data primer dapat dilakukan melalui observasi dan wawancara.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan perolehan data dari hasil pencatatan dokumentasi yang telah ada sebelumnya. Peneliti melakukan studi literatur dalam mencari data yang dibutuhkan dalam penelitian dari berbagai sumber, misalnya: dokumentasi, hasil penelitian sebelumnya (*report*), maupun dari berita aktual (*news*).

D. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif didapatkan dari kasus baru sehingga dalam menentukan informan penelitian harus melihat *social situation* yang terdiri dari *actor* (orang), *place* (tempat) dan *activity* (aktivitas) yang dimanfaatkan untuk pengumpulan data dalam penelitian.

Adapun cara pengambilan sampel (*teknik sampling*) yang digunakan adalah *non probability sampling* tipe *purposive sampling* (Sugiyono, 2015).

Penelitian ini berangkat dari kasus baru di Kabupaten Soppeng yakni *smart city*, dimana dalam pelaksanaannya diterapkan indikator *smart government*.

Adapun informan dalam penelitian yaitu :

No.	Nama	Jabatan	Inisial	Keterangan
1.	H. A. Kaswadi Razak, SE	Bupati Kabupaten Soppeng	KR	Sebagai pengambil keputusan kebijakan E-Government
2.	Drs. A. Fithratuddin	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Soppeng	F	Sebagai pelaksana teknis terkait perangkat-perangkat pendukung program E-Government di kabupaten Soppeng
3.	Irfan, S.Pd	Staf bidang administrasi pemerintahan Sekretariat daerah Kab. Soppeng	I	Sebagai operator komputer Sekretariat daerah Kab. Soppeng
4.	Wiwin Saputra, SE	Staf bidang perbendaharaan BPKD Ka. Soppeng	WS	Operator Komputer bidang perbendaharaan BPKD Kab. Soppeng
5.	Syarif Hidayat	Staf DPMPTSP Kab. Soppeng	SH	Operator Aplikasi LaSIDE
6.	Rudi Hadiano	Operator Konsol DPPKAD Kab. Soppeng	RH	Admin aplikasi PADDARE
7.	Jamal Akbar	Operator program Kartu Macca Kab. Soppeng	JA	Admin Kartu Macca

Tabel 4.1 Daftar Informan

E. Teknik dan Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu data primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi ialah mengamati secara langsung proses pelaksanaan kerja setiap bidang pendukung *smart government* diantaranya, mengamati tentang aktivitas apa saja yang terkait dengan fokus penelitian serta dapat menemukan, mengumpulkan data-data yang dianggap perlu. Aktivitas ini berupa pengamatan terhadap tata cara pengoperasian sebuah sistem informasi elektronik dan pengamatan terhadap infrastruktur yang digunakan.

2. Wawancara

Wawancara adalah melakukan pertemuan yang diawali dengan membuat kontrak waktu terlebih dahulu dan adapun informan yang tidak dilakukan kontrak waktu sebelumnya dapat diangkat sebagai informan baru jika memiliki kapasitas yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian.

3. Dokumen

Dokumen yang peneliti maksud adalah macam-macam surat berharga yang berisi data dan informasi sesuai dengan tema penelitian. Dokumen diperoleh dengan teknik pengkajian studi literatur dari hasil penelitian sebelumnya maupun berita aktual, terkait pelaksanaan *smart government* di Kabupaten Soppeng yakni terdiri dari pelaksanaan *online service*,

infrastruktur dan *open governance* di Kabupaten Soppeng maupun dokumen yang diberikan secara langsung oleh informan dilapangan.

F. Teknik Analisa Data

1. Analisa sebelum di Lapangan

Melakukan analisis dari studi literatur, berita ilmiah maupun dari hasil penelitian sebelumnya tentang *smart government* di Kabupaten Soppeng sebelum kelapangan melakukan penelitian. Analisa dilakukan sebagai acuan peneliti sehingga dapat terarah dalam menentukan fokus penelitian.

2. Analisa Data Model Miles and Huberman

Proses analisa data kualitatif peneliti menggunakan 3 komponen utama dalam Sugiyono (2015) yaitu sebagai berikut :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dalam reduksi data dilakukan pemilahan data yang penting, membuat kategori (pengelompokan data), dan membuang yang tidak dipakai atau digunakan untuk kepentingan penelitian.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Data disajikan kedalam pola tabel, grafik, maupun *pie chard* sehingga data terorganisir dan akan semakin mudah untuk dipahami. Penyajian data di uraiakan secara singkat dalam bentuk teks naratif.

c. Penarikan kesimpulan

Membuat kesimpulan dan melakukan verifikasi data awal yang diperoleh merupakan langkah terakhir dalam pengolahan data. Kesimpulan merupakan temuan dari penelitian yang dapat berupa

deskripsi (gambaran) yang sebelumnya masih remang-remang, setelah dilakukan peneliti menjadi data yang jelas dan akurat.

G. Pengabsahan Data

Uji keabsahan data menurut Sugioyono (2015) dalam penelitian kualitatif meliputi 4 bagian yang akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Kredibilitas (*credibility*) merupakan uji keabsahan data atau kepercayaan terhadap hasil penelitian dilakukan dengan menambah waktu untuk melakukan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi, analisis kasus negatif dan *membercheck*.
2. Transferabilitas (*transferability*) ialah validitas eksternal yang menunjukkan tingkat ketepatan atau memperoleh gambaran dari hasil penelitian dapat diterapkan atau diberlakukan (*transferability*).
3. Dependabilitas (*dependability*) atau tidak reliabel dilakukan dengan cara audit terhadap proses penelitian secara menyeluruh oleh pembimbing. Jika peneliti tidak dapat menunjukkan adanya jejak aktivitas lapangan maka dependabilitas penelitiannya patut diragukan.
4. Konfirmabilitas (*confirmability*) atau uji objektivitas penelitian artinya menguji hasil penelitian dengan proses yang telah dilakukan (*dependability*). Penelitian dapat dikatakan memenuhi standar konfirmabilitas apabila hasil yang diperoleh dari penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Wilayah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Soppeng adalah salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis terletak diantara $4^{\circ} 06' 00''$ - $4^{\circ} 32' 00''$ Lintang Selatan $119^{\circ} 42' 18''$ - $120^{\circ} 06' 13''$ Bujur Timur dan berada sekitar 180 km di sebelah utara Kota Makassar. Luas wilayah Kabupaten Soppeng tercatat 1.500 km^2 terdiri dari daratan dan perbukitan. Luas daratan 700 km^2 dengan ketinggian rata-rata ± 60 Mdpl. Luas perbukitan 800 km^2 berada pada ketinggian rata-rata 200 Mdpl (Soppeng, 2017).

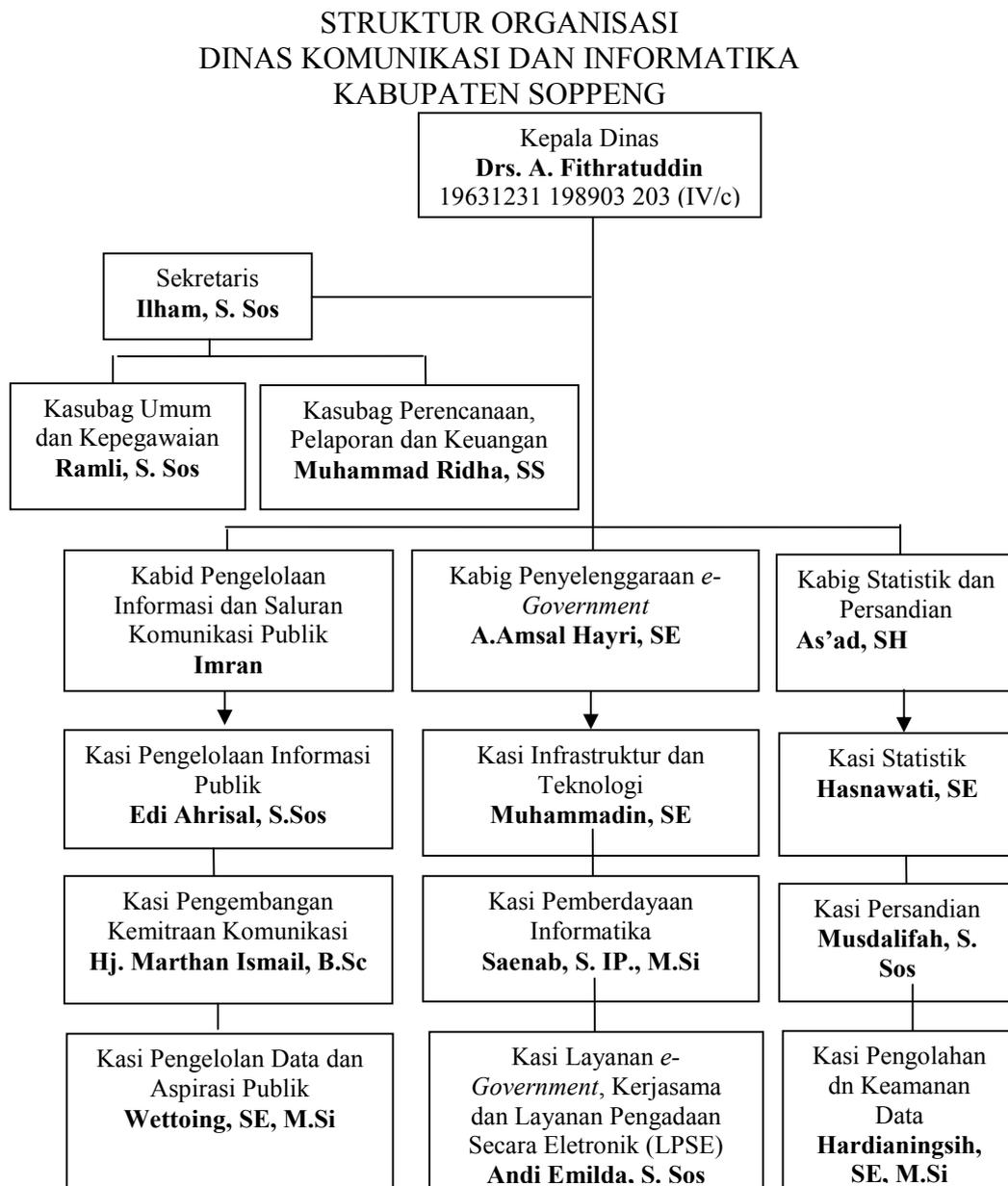
Secara administratif Kabupaten Soppeng terbagi atas 8 kecamatan, 21 kelurahan, 48 desa, 39 lingkungan, 124 dusun, 438 rukun kampung dan 1163 rukun tetangga dengan ibu kota Kabupaten Soppeng yaitu Kota Watansoppeng. Adapun batas wilayah Kabupaten Soppeng terdiri dari: sebelah utara Kabupaten Sidenreng Rappang dan Wajo, sebelah timur Kabupaten Wajo dan Bone, sebelah selatan kabupaten Bone dan sebelah barat Kabupaten Barru(Soppeng, 2017).

Kondisi demografis penduduk Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 berjumlah 241.430 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 116.447 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 124.983 jiwa.

Penduduk tersebut tersebar di seluruh wilayah kabupaten Soppeng (Soppeng, 2017).

2. Struktur Kelembagaan Pelaksanaan *Smart Government*

a. Struktur Organisasi Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Soppeng



Bagan 4.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Soppeng

(Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2018)

Dari struktur kelembagaan Dinas Kominfo, masing-masing bidang memiliki pembagian tugas. Berikut pernyataan dari Bapak F selaku Kepala Dinas Kominfo Kab. Soppeng:

“Semua informasi yang berkaitan dengan Kabupaten Soppeng melalui Kominfo”

“Berbicara masalah informasi disini (kabid 1) datanya disini”
 “Kabid ini yang mengelolah apakah masih mau diolah, mau dibawa kemana terutama ke media kaitannya kedia media banyak-banyak”

Dari pernyataan informan diatas mengemukakan di bagianbidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik berperan mengolah informasi yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah Soppeng, baik data mentah yang masih perlu diolah ataupun data yang sudah jadi dan siap untuk di publikasikan ke masyarakat.

“Sudah namanya ini, sudah masuk sebagai umpamanya yang berkaitan dengan *e-government* berkitan dengan *e-government* ini. hampir ee *smart government*. *Smart government* ini lebih cenderung kesini, yang lainnya sebenarnya ini mendukung, jadi ada namanya kepala bidang penyelenggaraan *e-government*”

“Keterbukaannya itu aplikasi, mengolah data ee mengelolanya dan disitu juga ada masalah statistik dan persandian ee mengenai ITnya disitu”

Dari pernyataan Bapak F memaparkan bahwa pera dari kabid penyelenggaraan *e-government* adalah keterbukaan data yang berkaitan dengan *smart government*.

“Mengolah data ee mengelolanya dan disitu juga ada masalah statistik dan persandian ee mengenai ITnya disitu”

“Kita masih masih menyimpan secara IT untuk dikelola dipersandian. ada namanya seksi coba kita lihat. Seksi pengolahan dan keamanan data, ada seksi yang menangani itu dimana disimpan datanya bagaimana data itu tersimpan dengan aman. Baik aman dari sisi orang yang tidak bertanggung jawab maupun aman dari sisi gangguan virus atau apa. Jadi ada bagian yang menangani itu.”

Pernyataan kadis kominfo mengenai peran kabid statistik dan persandian berperan dalam mengoperasikan IT, mengolah data, menyimpan data secara IT dan menjaga keamanan data dari serangan virus maupun *hacker*. Sedangkan

“Kalau menghusus belum ada timnya tapi untuk pelaksanaan sudah ada. Mungkin adek sudah lihat di atas. (merujuk ke ruang SCC)”

“Tetap dibawa naungan *e-government* secara umum dia disitu dikelola ITnya dikelola dengan terkait dengan SKPD apa saja yang mau dipublish. Jadi kita belum ada tim tim khusus.”

Pelaksanaan *smart government* secara keseluruhan tidak hanya dilaksanakan oleh kabid penyelenggaraan *e-government* namun semua bidang di Dinas Kominfo saling berkaitan dan saling bekerjasama mulai dari mengolah informasi, publikasi data hingga penyimpanan dan keamanan data. Namun dalam memantau pelaksanaan *smart government* di beberapa SKPD Kominfo belum memiliki tim khusus namun telah didirikan *Soppeng Commad Center* (SCC) yang berada dibawa kabid 2 (penyelenggaraan *e-government*).

b. SKPD di Kabupaten Soppeng

Berikut ini nama SKPD di Kabupaten Soppeng :

NO	NAMA SKPD
1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD
3	Inspektorat Daerah
4	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
6	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber daya Manusia
7	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan
10	Dinas Kesehatan
11	Rsud Latemmamala
12	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
13	Dinas Pendidikan
14	Dinas Lingkungan Hidup
15	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usahan Kecil Menengah
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
18	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
19	Dinas Pertanian
20	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
22	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
23	Dinas Perumahan Dan Kawasan Perumahan
24	Dinas Perhubungan
25	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
26	Dinas Pemuda Dan Olahraga
27	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
28	Dinas Sosial
29	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
30	Dinas Komunikasi Dan Informatika
31	Kecamatan Ganra
32	Kecamatan Lilirilau
33	Kecamatan Marioriawa
34	Kecamatan Lalabata
35	Kecamatan Marioriwawo
36	Kecamatan Donri-Donri
37	Kecamatan Liliriaja
38	Kecamatan Citta

Tabel 4.2 Daftar SKPD di Kabupaten Soppeng

B. Pelayanan Online (*Online Service*)

Pelaksanaan *online Service* khususnya di wilayah pemerintah daerah Kabupaten Soppeng sudah berjalan di setiap bagian, misalnya bagian administrasi pemerintah. Berikut ini pernyataan dari Bapak I :

“Kalau terkait pelaksanaan *online service* itu sekarang sudah bagus karena kan yang pelayanan *online service* dibagian Kominfo kaya'nya itu. Disitu sudah di, apa lagi namanya, sudah posting semua di website pemerintah kalau terkait pelayanan online...”

Dari informasi tersebut didapatkan data bahwa pelaksanaan *online service* di wilayah pemerintah daerah Kabupaten Soppeng dijalankan oleh Dinas Kominfo untuk memberikan pelayanan secara online.

Adapun pelaksanaan *online services* sudah berjalan di beberapa SKPD di Kabupaten Soppeng salah satunya adalah BPKD Kabupaten Soppeng. Berikut ini pernyataan dari Bapak WS :

“Karena yang dikelola BPKD itu adalah aplikasi sistem aplikasi keuangan berbasis online tapi hanya beberapa orang yang bisa lihat akses itu untuk itu keuangan tapi kalau untuk pelayanan publik dia terbuka untuk sesama SKPDnya saja”

Dari pernyataan Bapak WS diatas disimpulkan bahwa pelaksanaan *online services* sudah berjalan namun masih terbatas untuk lingkup SKPD saja. Sistem aplikasi BPKD hanya dapat diakses oleh orang tertentu yang ada dalam lingkup BPKD.

1. Tata Cara Online (*Online Prosedur*)

- a. Program layanan SCC (*Soppeng Command Centre*) merupakan pusat pelayanan masyarakat untuk menciptakan layanan cepat dan tepat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Soppeng. Bentuk pelaksanaan SCC ini terdiri dari pengadaan

CCTV untuk *monitoring room*, dan sebagai pusat layanan komunikasi masyarakat dengan petugas pemadam kebakaran, rumah sakit, SKPD lain dan ruang-ruang publik. *SoppengCommand Centre* (SCC) atau pusat kendali Soppeng, berikut pernyataan Bapak KR:

“Inikan salah satunya yang ada disebelah ini (menunjuk ruang SCC), sistem informasi pelayanan publik, yang ada disebelah termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan, perekonomian, pelayanan KTP, rumah sakit, semua. Ya disamping kita memonitor, mengontrol dan menyampaikan, jadi banyak hal manfaat yang bisa kita dapatkan dengan program ini.”

Berdasarkan pernyataan Bapak KR diatas bahwa, Implementasi dari inovasi-inovasi pelayanan publik, keterbukaan, dan akuntabilitas pemerintah di buat dalam berbagai macam bentuk media, *on line* maupun pelayanan langsung, seperti website, aplikasi, nomor darurat *Call Centre* dan pemberian bantuan dengan metode kartu terintegrasi, maupun pelayanan langsung satu pintu. Melalui media-media tersebut diintegrasikan melalui satu ruangan kendali yaitu pada ruang *Soppeng Command Centre* (SCC) yang meliputi semua bidang pelayanan masyarakat.

Kemudian diperjelas oleh informan ke 2. *Soppeng Command Centre* (SCC) atau pusat kendali Soppeng ini memiliki 3 fungsionalitas utama yaitu CCTV, Call Centre dan Kartu Macca.

1) Pertama adalah untuk pemantauan menggunakan CCTV, SCC berada langsung pada ruang kerja bupati Soppeng, sekarang

terdapat 16 titik untuk mengawasi aktivitas pada SKPD dan ruang-ruang publik yang bersifat utama. Sehingga dapat memberikan pengawasan secara terpadu tanpa turun langsung ke lokasi. Berikut pernyataan Bapak F selaku Kepala Dinas Kominfo Kab. Soppeng.

“Ya itu di SCC itu merupakan aplikasi atau implementasi dari pemerintahan yang melayani dan lebih baik. Kenapa kami katakan itu aplikasinya, itu karena disitulah pak bupati tinggal di ruangnya dia bisa mengontrol itu semua tempat-tempat pelayanan umum, SCC itu karena disitu keliatan 16 titik yang berkaitan dengan pelayanan dasar tadi sebagaimana yang saya sampaikan ada di RS, ada di dinas sosial, ada di pelayanan KTP, ada di pelayanan satu atap ini.”

- 2) Kedua adalah fasilitas *call centre*, yaitu satu nomor khusus yang digunakan untuk kegawatdaruratan yang fungsinya memberikan respon cepat terhadap permintaan masyarakat dalam situasi genting untuk segera mendapatkan tindakan secara cepat dari pihak terkait. Berikut pernyataan Bapak F selaku Kepala Dinas Kominfo Kab. Soppeng:

“*Call centre* ada, untuk pemadam kebakaran, PSC (*Publik Safati Centre*) untuk pelayanan ambulance, berkaitan dengan kegawat daruratan”

Berdasarkan pengamatan peneliti *call centre* yang dimaksud adalah beberapa nomor yang difasilitasi oleh pemerintah dan bisa dihubungi sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Berikut ini nomor kontak dipaparkan dalam tabel berikut :

No.	Jenis Layanan Darurat	No. Kontak
1.	Layanan kesehatan atau ambulance “Oto Mappajappa” oleh PSC (<i>Publik Safety Centre</i>)	119 atau 0484-119
2.	Layanan pemadam kebakaran untuk Kecamatan Lalabata	Tlp. 0484-23501
3.	Layanan pemadam kebakaran untuk kecamatan Marioriwawo	Hp. 081287727008
4.	Layanan pemadam kebakaran untuk Kecamatan Marioriawa	Hp. 081287727753
5.	Layanan pemadam kebakaran untuk kecamatan Liliraja	Hp. 085397760924
6.	Layanan pemadam kebakaran untuk Kecamatan Citta	Hp. 085397760925
7.	Layanan pemadam kebakaran untuk kecamatan Lilirilau	Hp. 085397760924
8.	Layanan Pemadam kebakaran untuk Kecamatan Donri-Donri	Hp.-
9.	Layanan pemadam kebakaran untuk kecamatan Ganra	Hp.-
10.	Layanan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)	Hp. 085242885524

Tabel 4.3 Daftar kontak layanan darurat Pemerintah Kabupaten Soppeng.

khusus pada layanan pemadam kebakaran peneliti menemukan telah disiapkan pada masing-masing Kecamatan yaitu satu

kecamatan satu pos jaga dan satu unit mobil pemadam kebakaran, yang ditempatkan pada lokasi strategis jangkauan seluruh wilayah teritorial kecamatan, yang bertujuan untuk tercapainya tindakan layanan cepat terhadap kejadian kebakaran kemudian melakukan koordinasi kepada pemadam kebakaran pusat untuk di *back up*.

- 3) Kemudian fungsionalitas yang ketiga adalah, sistem pemberian bantuan sosial melalui satu kartu terpadu yang dinamakan Kartu Macca. Dari hasil observasi peneliti ditemukan bahwa, fungsi Kartu Macca adalah mengintegrasikan pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu dalam beberapa bidang terhadap kebutuhan utama masyarakat, yaitu pada bidang kesehatan, pendidikan, bantuan hukum, dan pembagian beras sejahtera. Namun secara teknis dalam kartu macca pelaksanaannya dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Soppeng. kartu macca memiliki fitur yang unik yakni dapat diakses melalui website www.kartumacca.id namun hanya dapat diakses secara mendalam oleh pemegang kartu tersebut untuk melihat informasi bantuan yang diterima oleh pemegang kartu. “kartu Macca di Dinas Sosial” ujar Bapak F selaku Kepala Dinas Kominfo Kab. Soppeng.

Dari informasi tersebut dapat bahwa pelaksana dari program Kartu Macca adalah Dinas Sosial dan pelaksanaannya

belum terintegrasi dengan SCC namun kegiatan di Dinas Sosial sudah terpantau dengan adanya CCTV yang terhubung ke SCC. “untuk sampai hari ini belum terhubung” ujar Bapak F selaku Kepala Dinas Kominfo Kab. Soppeng.

Berikut wawancara dengan bapak JA selaku operator Kartu Macca.

“Fungsi dan tujuan program kartu Macca ini kan ini program pemerintah. Fungsinya dia memiliki fungsi sebagai ee saya ambil contohnya saja di? saya ambil bibit gratis, bastra bantuan beras raskin, dia bisa ee apa bantuan pendidikan sama pelayanan-pelayanan kesehatan, pelayanan di transduk, dengan kartu macca ini dia bisa langsung dilayani tanpa antri. Khusus untuk yang memiliki kartu macca.”

Pernyataan bapak JA menunjukkan bahwa Kartu Macca adalah kartu untuk layanan pemberian bantuan terintegrasi dengan maksud untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan yang bersifat utama khususnya pemegang kartu tersebut. Penerima kartu macca tersebut adalah masyarakat kurang mampu dan rentang miskin, berikut pernyataan bapak JA

“Yang pertama itu, orang yang kurang mampu sama yang rentang miskin, kurang mampu itu dalam kategori kurang dari segi penghasilan sama ada yang cuma numpang dirumah orang. Kalau yang rentang miskin ini dia ada pekerjaan tapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari.”

Kartu Macca diberikan dengan cara mengambil data KK dalam kategori kurang mampu dan rentang miskin yang dimiliki

oleh kementerian sosial sehingga pembagian kartu macca dapat tepat sasaran. Dalam satu KK cukup satu kartu yang dimiliki untuk semua orang didalamnya berhak mendapatkan layanan yang di tanggung melalui Kartu Maacca ini. Berikut pernyataan Bapak JA

“data yang dipakai berasal dari kemensos langsung data nasional sehingga tidak lagi terjadi kecurangan dalam penyaluran di tingkat bawah tidak adami yang kasi keluarganya saja, temannya dan orang dekatnya begitu, baru dalam satu kk itu semua yang ada namanya dalam kartu keluarga itu berhak mendapatkan semuanya.”

Khusus pada bantuan rastra penyaluran dilakukan setiap bulan melalui pemerintah desa cukup memperlihatkan kartu tersebut. Rastra yang didapatkan sebanyak 10kg beras perbulannya. Sebagaimana pernyataan bapak JA berikut.

“Kalau rastra penyalurannya setiap bulan jumlahnya sekarang 10 kg per keluarga yang di drop ke desa. Desanya yang bagikan ada juga datang langsung yang ambil cukup dengan kartunya yang diperlihatkan.”

Kartu macca dicetak dan disalurkan sejak tahun 2017 dengan kuota sebanyak 13.161 penerima sedangkan jumlah yang telah tersalurkan sebanyak 12.825 KK masih ada sisa yang belum tersalurkan. Berikut pernyataan bapak JA.

“Ini sudah mulai dari tahun, pencetakannya mulai dari tahun 2017. Disalurkan juga tahun 2017 dan untuk kuotanya itu ada 13.161 yang sudah tercetak itu sudah 12.825. Ini kuota tadinya 13.161”

Kartu macca memiliki website untuk melihat informasi mengenai bantuan yang diterima misalnya untuk mengupdate data yang berubah dalam satu KK. Berikut pernyataan bapak JA

“Didalam websitenya itu ada fungsinya, alurnya bagaimana untuk mendapatkan kartunya mendapatkan bantuannya dan eee khusus yang pemegang kartu bisa langsung ke kantor mendaftar. Kan diharapkan itu pemegang kartu setiap ada perubahan dalam susunan KK diharapkan ke kantor update datanya. Misalkan yaa ada kepala keluarganya yang meninggal, kan di kartu itu yang tercetak atas nama kepala keluarga jadi otomatis kalau meninggal kepala keluarganya harus di update ulang. Kartu macca itu kan Cuma satu nama yang di kartu tapi didalamnya sudah tertera semua anggota keluarganya.”

- b. Dibentuknya dinas Layanan perizinan terpadu yaitu dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang bertujuan mengefisienkan langkah dalam membuat perizinan. DPMPTSP aplikasi yang bernama layanan sistem informasi dan data elektronik berbasis android disingkat (LaSIDE) yang bertujuan memudahkan, mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau bagi masyarakat dan pelaku usaha. “La Side di PTSP, itu masih berjalan sendiri sendiri tapi kedepannya akan terintegrasi semua” ujar Bapak F selaku Kepala Dinas Kominfo Kab. Soppeng:
- Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa aplikasi La Side dijalankan di DPMPTSP dan dikelola sendiri. Namun dari hasil

observasi ditemukan bahwa aplikasi tersebut belum berjalan maksimal.

Berikut adalah wawancara dengan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh bapak SH

Aplikasi LaSIDE berisi fitur-fitur tentang jenis-jenis layanan perizinan dengan cara mendownload formulir sesuai dengan jenis perizinan yang diinginkan, memeriksa status layanan izin yang telah di proses dan melakukan pengaduan tentang pelayanan oleh DPMPTSP serta dapat melihat berapa besaran retribusi yang akan dibayar khusus pada layanan-layanan khusus yang memakai aturan retribusi . Berikut pernyataan bapak SH selaku operator.

Kalau aplikasi LaSide itu artinya selain kita bisa melihat status berkas, kita juga bisa melihat persyaratan – persyaratan perizinan, kita juga bisa cek beberapa retribusi kalau dikenakan retribusi, kan disini tidak semuanya dikenakan retribusi, hanya ada izin-izin tertentu Perda No. 6 tentang retribusi ee apalagi perizinan tertentu. ee artinya kan sekarang yang dikenakan retribusi hanya IMD, izin proyek dengan izin perikanan. Jadi, kita bisa lihat disitu ee anunya apa, kita bisa melakukan menghitung pembayaran disitu. Umpa IMD sekian, otomatis kita bisa lihat sekian pembayaran saya. Kemudian kita juga bisa lihat persyaratan perizinan, ada juga persyaratan perizinan.

Aplikasi LaSIDE di lounching pada tahun 2017

“Tahun ini, tahun kemarin 2017 akhir.”

Kendala yang sering ditemui dalam penggunaan Aplikasi LaSIDE adalah masalah kekuatan jaringan internet sehingga mengganggu

kinerja aplikasi sehingga sering terjadi kegagalan dalam mengupdate dan mendownload data didalamnya.

“Kendala itu hanya kan sering karena faktor jaringan saja. Karena kan kita disini sering itu apa jaringan internetnya sering terputus penguploadannya data sering terhambat juga karena harus di upload setiap hari. Karena kalau tidak diupload untuk hari ini otomatis kita tidak bisa liat bagaimana status berkas karena aplikasi ini berhubungan juga diluar. Di loket. Bukan, dipendaftaran. Artinya kan kalau sudah masuk otomatis nanti kalau umpanya jam 12 kita upload lagi. Itumi kendalanya sekarang. Kendalanya karena eee pertama itukan mengenai jaringan, lalod juga sering kalau kita tiap hari mengupload lebih 1000 data. Server ini.”

Sosialisasi ke pada masyarakat telah dilakukan namun masih sangat sedikit, dikarenakan masih dalam tahap percobaan.

“Kami belum bisa pastikan sekian masyarakat yang jelas kami sudah sosialisasikan ke masyarakat bahwa ada aplikasi ini. kan ini aplikasi ini kita nyatakan baru.”

2. Pembayaran Eletrik (*E-Benefits Payment*)

Pembayaran Elektrik (*E-Benefits Payment*) merupakan subindikator dari *smart government* yang melengkapi dari setiap pelaksanaan pelayanan online berkaitan dengan pembayaran pajak, retribusi maupun pembayaran lainnya. Pelaksanaan Pembayaran pajak, retribusi dan lainnya secara elektrik di kabupaten Soppeng belum diterapkan akan tetapi masih dalam proses perancangan untuk pengadaan. Berikut pernyataan Bapak KR.

“Belum ada, tapi kalau sistemnya sudah ada, sementara kita mau melakukan seperti itu. Seperti inikan inovasi aplikasi pelayanan pajak daerah jadi kita namakan aplikasi itu “PADDARE” jadi dinas

penanaman modal misalnya, inovasinya disitu pelayanan gerak berbasis satu pintu.”

Pernyataan diatas menunjukkan aplikasi PADDARE merupakan inovasi pemerintah Kabupaten Soppeng yang akan memberikan kemudahan kepada msyarakat dalam mendapatkan informasi maupun layanan tentang perpajakan. Berdasarkan oservasi peneliti aplikasi PADDARE berfungsi untuk mendapatkan informasi tentang status pajak dan pembayaran jenis pajak yang akan dibayar. Adapun informasi mengenai teknis penggunaan aplikasi PADDARE sebagai berikut.

Aplikasi PADDARE adalah aplikasi berbasis android berisi tentang informasi, peryaratan dan jumlah pembayaran PBB. Berikut pernyataan bapak RH selaku operator konsol kantor DPPKAD Kabupaten Soppeng

“Itu aplikasi PADDARE sebenarnya aplikasi berbasis android toh ? untuk informasi di masyarakat. Dia lebih banyak materinya di PBB penjamin bangunan jadi kalau misalnya wajib pajak mau tau berapa pajaknya tahun ini, bisa di cek disitu di aplikasi.”

Cara menggunakan aplikasi ini adalah dengan membuka langsung pada aplikasi selanjutnya memasukkan nomor wajib pajak selanjutnya akan muncul jumlah data-data yang dimiliki oleh wajib pajak. Berikut pernyataan bapak RH

“dibuka langsung, sisa masukkan langsung nomor bio pajaknya munculmi data-datanya semua.”

Aplikasi PADDARE memiliki fitur melakukan perubahan data dengan cara mendownload formulir pada aplikasi. Berikut pernyataan bapak RH

“Iyye. sudah bisa. teruskan ada juga pelayanan disini. Eeee, misalnya kalau mau balik nama atau pemecahan tanah kan bisa dipecah PBBnya, bisa di download langsung formulirnya disitu. tidak langsungmi kesini ambil formulir. Di download formulir baru diisi baru dibawa kesini. lengkap mi semua persyaratnya.”

Dalam pengenalannya, aplikasi PADDARE telah disosialisasikan kepada masyarakat melalui pameran dan masih belum dilakukan secara intens ke masyarakat.

“Kalau kemarin sebatas anuji. Pernah diperkenalkan di bursa-bursa lapangan gasis toh kita ikutkan juga disitu. kana da inovasi-inovasi setiap instansi. Cuma kalau yang bersentuhan langsung dengan masyarakat LaSide dan Paddare kalau yang lain hanya sebatas internal.”

Masalah yang sering di temui adalah mengenai kekuatan jaringan namun pihak pengelola mengatasinya dengan menggunakan Speede.

“Paling kalau dari jaringanji. Tapi kalau jaringan kan, selama akses internet sampai ke server masuk itu bisa, lancar terusji ini. Selama speede tidak bermasalah.”

C. Keterbukaan Pemerintah (*Open Government*)

Pelaksanaan *open government* di Kabupaten Soppeng sudah berjalan disetiap instansi pemerintah. Misalnya di administrasi pemerintahan dalam hal ini bidang pemerintah dan otonomi daerah bagian operator komputer Bapak I menyatakan:

“Kalau yang terkait dengan pelaksanaan *opengovernment* tiap tahun itu dibagian pemerintah daerah buat laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah dan itu di publikasikan di kaya’ dirilis dikoran-koran begitu. Semua tentang disitu tentang informasi pencapaian. Begitu ji”.

Dari informasi tersebut ditemukan bahwa pelaksanaan *opengovernment* yang dijalankan bidang pemerintah dan otonomi daerah dalam bentuk laporan pertanggungjawaban tahunan. Laporan tersebut dapat diakses melalui berita dalam koran dan website Pemerintah Daerah tentang pencapaian yang diperoleh selama satu tahun.

Pelaksanaan *open government* di Kabupaten Soppeng sudah dijalankan beberapa SKPD. Salah satunya adalah BPKD. Berikut ini pernyataan Bapak WS selaku pegawai pada bidang perbendaharaan tentang pelaksanaan *open government* di BPKD Kabupaten Soppeng:

“Kalau di BKPD Soppeng eee apa namanya dia tidak terbuka juga kalau untuk ke masyarakatnya tapi kalau untuk sesama lingkungan SKPD Soppeng ee terbuka. Itu untuk BPKD, tidak tau yang lain”.

Dari informasi diatas disimpulkan bahwa pelaksanaan *open government* di BPKD belum berjalan secara maksimal karena informasi yang ada dalam BPKD hanya bisa diakses internal SKPD dan belum bisa diakses oleh masyarakat, dikarenakan data tersebut masih berbentuk data mentah belum menjadi data yang siap untuk di pulkasikan ke masyarakat. Data tersebut masih dalam tahap proses pengolahan.

1. Keterbukaan Data (*Open Data*)

Keterbukaan data (*open data*) pada pelaksanaan *smart government* adalah memberikan informasi kepada masyarakat tentang transparansi

dan akuntabilitas pemerintah yang dikemas melalui teknologi informasi (*media online*). Data yang dimaksud adalah data-data yang benilai tinggi dapat berupa informasi tentang profil instansi, informasi data tentang pelaporan transparansi keuangan, data kependudukan, informasi data tentang hukum, informasi tentang potensi wisata, ruang-ruang publik, informasi tentang pemanfaatan dan pemberdayaan sumber daya manusia, sumber daya materi, sumber daya alam, serta informasi data tentang kegiatan dan kinerja instansi.

Data data tersebut dapat diakses dengan mudah, cepat dan murah dikemas dalam bentuk website, blog, maupun aplikasi dan aplikasi-aplikasi sosial media. Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, berikut media yang dapat diakses melalui media online. “melalui aplikasi yang ada di Kominfo dan Bappeda” ujar Bapak KR:

Dalam pelaksanaan keterbukaan data pemerintah dapat diakses melalui data yang sudah disediakan oleh Dinas Kominfo, Bappeda dan SKPD lain.

Informasi terkait keterbukaan data kemudian di jelaskan oleh Bapak F selaku Kepala Dinas Kominfo Kab. Soppeng:

“Semua, kita semua menggunakan teknologi, ada website Pemda, ada media sosial, masing-masing SKPD ada website juga dikelola oleh SKPD sendiri. Khusus Pemda, Kominfo yang kelola. Jadi disamping ada webnya Pemda, kita juga SKPD masing-masing ada webnya yang dikelola sendiri tetapi informasi yang disampaikan SKPD ke Pemda kita juga kasi masuk ke web pemda. Entah dia masukkan di webnya sendiri itu urusannya mereka. Tetapi didalam kami sampaikan ke mereka, apapun aktivitas apapun informasi

“yang harus disampaikan kepada masyarakat disampaikan ke web baik dilaksanakan atau tidak itu urusan mereka. Tetapi ketika itu informasi disampaikan, ke kami masukkan di web, maupun di media sosial, kita akan itu ee, ke instagram, FB dan sebagainya.”

Berdasarkan pernyataan diatas, menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Soppeng telah melakukan inovasi-inovasi terkait keterbukaan pemerintah melalui media online. Terkait dengan data yang disajikan, secara teknis masing-masing data dikelola oleh lembaga/SKPD terkait sebelum di publikasikan kepada masyarakat. Berikut ini informasi tambahan mengenai ketebukaan data dari Bapak F selaku Kepala Dinas Kominfo Kab. Soppeng:

“Ada informasi yang belum bisa disampaikan ke masyarakat itulah bagian dari informasi yang belum bisa diinformasikan. Jadi kita proses, jadi umpamanya dalam penyusunan anggaran ada tahapan. Didalam rancangan anggaran belum bisa kita lempar keluar karena itu adalah rancangan, masih bisa berubah. Jangan sampai rancangan itu masyarakat menjadikan dasar bahwa eih APBDnya Soppeng ee apa anggaran untuk jalan ini sudah ok dalam APBD padahal masih dalam rancangan. Didalam prosesnya itu rancangan bisa saja dihapus bisa ditambah, bisa tetap. Ee itulah informasi-informasi yang dalam proses tidak bisa disampaikan ke masyarakat”

Dari pernyataan tersebut didapatkan bahwa seluruh informasi yang di publish melalui website Kominfo dan SKPD lain terbuka untuk diakses oleh masyarakat. Adapun informasi yang masih belum dapat diketahui oleh masyarakat merupakan data atau informasi yang masih dalam proses pengolahan yang maka belum dapat publikasikan.

Sesuai dengan pernyataan Bapak F selaku Kepala Dinas Kominfo Kab. Soppeng diatas menunjukkan sesuai dengan observasi yang peneliti lakukan terhadap link-link atau laman informasi yang dimiliki

oleh SKPD terkait keterbukaan data dan informasi pemerintah kabupaten Soppeng. Berikut hasil observasi peneliti.

- a. Laman website resmi pemerintah Kabupaten Soppeng <https://soppengkab.co.id> dengan berbagai fitur pelayanan informasi dan data didalamnya, yang dikelola oleh dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Soppeng.
- b. Website PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah) Kabupaten Soppeng <http://ppid.soppengkab.go.id> oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng
- c. Laman resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng <https://disdukcapilsoppengkab.co.id>
- d. Laman website resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng <http://disdik.soppengkab.co.id> dan Website, soppeng.siap.web.id merupakan website yang dikembangkan oleh Telkom Indonesia yang merangkum seluruh data pada dinas pendidikan yang ada diseluruh Indonesia untuk mengakses informasi tentang pendidikan yang terkoneksi dengan data pada dinas pendidikan di seluruh Indonesia. Didalamnya berisi aplikasi-aplikasi terkait dengan pendidikan.
- e. Laman website resmi Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng <https://distan.soppengkab.co.id>
- f. Laman website resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng <http://disbudpar.soppengkab.co.id>

- g. Laman website resmi Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Soppeng <http://nakertrans.soppengkab.co.id>
- h. Laman website BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) <https://bkpsdm.soppengkab.co.id> Kabupaten Soppeng dan website <https://samp.soppengkab.go.id> memberikan informasi tentang Sistem Aplikasi Manajemen Pegawai Negri Sipil.
- i. Laman blog Dinas Sosial Kabupaten Soppeng dinsoskabsoppeng.blogspot.com dan website program pemberian bantuan dengan metode kartu terintegrasi yang di namakan kartu macca. kartu macca memiliki fitur yang unik yakni dapat diakses melalui website www.kartumacca.id, namun hanya dapat diakses secara mendalam oleh pemegang kartu tersebut untuk melihat informasi bantuan yang diterima si pemegang kartu.

Berikut adalah link-link yang dapat di akses oleh masyarakat setiap SKPD :

NO	NAMA SKPD	LINK	STATUS
1.	Sekretariat Daerah	setda.soppengkab.go.id	Tidak aktif
2.	Sekretariat DPRD	dprd-soppengkab.go.id	Tidak aktif
3.	Inspektorat Daerah	inspektorat.soppengkab.go.id	Aktif
4.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	bpkd.soppengkab.go.id	Aktif
5.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Kesbangpol.soppengkab.go.id	Tidak aktif
6.	Badan Kepegawaian Dan	bkpsdm.soppengkab.go.id	Aktif

	Pengembangan Sumber Daya Manusia		
7.	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	bappelitbangda.soppengkab.go.id	Aktif
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd.soppengkab.go.id	Tidak aktif
9.	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	dppkp.soppengkab.go.id	Tidak aktif
10.	Dinas Kesehatan	dinkes.soppengkab.go.id	Tidak aktif
11.	Rsud Latemmamala	-	-
12.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	dpupr.soppengkab.go.id	Tidak aktif
13.	Dinas Pendidikan	disdik.soppengkab.go.id	Aktif
14.	Dinas Lingkungan Hidup	dinaslh.soppengkab.go.id	Tidak aktif
15.	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usahan Kecil Menengah	dppkukm.soppengkab.go.id	Tidak aktif
16.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	dpmd.soppengkab.go.id	Tidak aktif
17.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	dppa.soppengkab.go.id	Tidak aktif
18.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	nakertrans.soppengkab.go.id	Aktif
19.	Dinas Pertanian	distan.soppengkab.go.id	Aktif
20.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	dpmpstsp.soppengkab.go.id	Aktif
21.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	disdukcapil.soppengkab.go.id	Aktif

22.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	satpolpp.soppengkab.go.id	Tidak aktif
23.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Perumahan	dppk.soppengkab.go.id	Tidak aktif
24.	Dinas Perhubungan	dishub.soppengkab.go.id	Tidak aktif
25.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	dppkb.soppengkab.go.id	Tidak aktif
26.	Dinas Pemuda Dan Olahraga	dispora.soppengkab.go.id	Tidak aktif
27.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	dpk.soppengkab.go.id	Tidak aktif
28.	Dinas Sosial	dinsos.soppengkab.go.id dan dinsokabsoppeng.blogspot.com	Tidak aktif Aktif
29.	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	disbudpar.soppengkab.go.id	Tidak aktif
30.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	diskominfo.soppengkab.go.id dan ppid.soppengkab.go.id	Aktif Aktif
31.	Kecamatan Ganra	ganra.soppengkab.go.id	Aktif
32.	Kecamatan Lilirilau	lilirilau.soppengkab.go.id	Aktif
33.	Kecamatan Marioriawa	marioriawa.soppengkab.go.id	Aktif
34.	Kecamatan Lalabata	lalabata.soppengkab.go.id	Aktif
35.	Kecamatan Marioriwawo	marioriwawo.soppengkab.go.id	Aktif
36.	Kecamatan Donri-Donri	donridonri.soppengkab.go.id	Aktif
37.	Kecamatan Liliriaja	liliriaja.soppengkab.go.id	Aktif
38.	Kecamatan Citta	citta.soppengkab.go.id	Aktif

Tabel 4.4 Daftar website setiap SKPD di Kabupaten Soppeng

Berdasarkan pengamatan diatas link-link tersebut tetap ditautkan dengan website Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng www.soppengkab.go.id untuk lebih memudahkan masyarakat dalam menemukan link website semua SKPD.

2. Keterbukaan Aplikasi (*Open Apps*)

Open Apps merupakan ketersediaan dan kemudahan akses masyarakat dalam hal, khusus informasi tentang transparansi dan akuntabilitas pemerintah Kabupaten Soppeng yang diakses melalui berbagai macam aplikasi yang disediakan. Baik aplikasi yang terintegrasi dengan website maupun aplikasi versi mobile (aplikasi berbasis *smart phone*). Berikut hasil observasi peneliti :

- a. Aplikasi SIMPEG (Sistem Informasi Kepegawaian) memberikan informasi tentang data kepegawaian yang ada di Kabupaten Soppeng, yang dikelola oleh BKD (Badan Kepegawaian Daerah).
- b. Aplikasi SIA (Sistem Informasi Absensi) memberikan informasi tentang laporan absensi pegawai diseluruh SKPD Kabupaten Soppeng.
- c. Aplikasi LaSIDE adalah aplikasi berbasis *smart phone* yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) dalam hal pemberian pelayanan perizinan secara terpadu dengan memberikan kemudahan akses informasi kepada pemohon dalam mengetahui langkah, syarat-

syarat, maupun biaya dalam sebuah perizinan. “La Side di PTSP “
 ujar Bapak F selaku Kepala Dinas Kominfo Kab. Soppeng.

- d. Aplikasi PADDARE adalah aplikasi berbasis *smart phone* yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berisi tentang persyaratan PBB, pengaduan pajak, informasi SPPT, informasi pembayaran PBB, dan pelaporan penerimaan pajak. “Paddare, di anu. Apa. Pengelola keuangan. Itu masih jalan sendiri-sendiri.” Ujar Bapak F selaku Kepala Dinas Kominfo Kab. Soppeng, sesuai dengan apa yang dikatakan Bapak KR “Inikan inovasi aplikasi pelayanan pajak daerah jadi kita namakan aplikasi itu “PADDARE”.
- e. Aplikasi yang dibawah oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) didalamnya mengelola laman/aplikasi berikut, LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) khusus pelayanan *e tendering*, TEPR/e *money* (Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran) khusus mengenai transparansi keuangan daerah, dan aplikasi SIRUP (Sistem Rencana Umum Pengadaan).
- f. Tersedianya akun-akun aplikasi media sosial resmi pemerintah Kabupaten Soppeng dan Semua SKPD yakni, akun resmi *Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, dan Google Plus*.

Berikut pernyataan dari Bapak F selaku Kepala Dinas Kominfo Kab. Soppeng:

“Kita mempublish di media sosial bisa di FB, dii apa namanya instagram kemudian juga disampaikan ke media yang mempublish juga membantu kami mempublish”

Berdasarkan analisa diatas menunjukkan bahwa aplikasi tersebut merupakan produk dari program *e-government* yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Soppeng di beberapa bidang instansi, sesuai dengan perencanaan sebelumnya aplikasi tersebut diintegrasikan kedalam satu ruang kendali (SCC) dan langsung diawasi oleh Bupati Soppeng, namun hal demikian belum terlaksana. Berikut pernyataan Bapak F selaku Kepala Dinas Kominfo Kab. Soppeng:

“Belum terintegrasi. Tetapi kedepannya kita harapkan semua aplikasi terintegrasi. Jadi bisa berkomunikasi melalui jalur kabel dan Pak Bupati nanti kedepannya bisa memantau hanya di SCC. Tidak meninggalkan tempat bisa memantau semua.”

Dari pernyataan tersebut dipaparkan bahwa semua aplikasi yang ada masih dikelola dan dikendalikan oleh SKPD terkait. Sejauh ini belum terintegrasi dengan Dinas Kominfo.

3. Keamanan Data (*Privacy*)

Keamanan yang dimaksud adalah keamanan terhadap bentuk-bentuk penyalahgunaan data, pemalsuan dan sampai pada keamanan terhadap peretasan data (*heacker*) terhadap data pengguna dan data penyedia layanan dalam aktivitas akses informasi dan transaksi elektronik yang mutlak sehingga mampu memberikan perlindungan secara teknis dan konstitusional.

Secara konstitusional privasi dalam aktivitas penggunaan informasi dan teknologi diatur dalam undang-undang no. 19 tahun 2016 tentang perubahan undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 26 ayat 1 & 2, dan aturan keamanan secara teknis diatur sesuai dengan kewenangan lembaga atau badan yang menjalankan sistem, namun tetap merujuk pada aturan perundang-undangan sebagai dasar pemikiran.

Untuk secara teknis berikut pernyataan Bapak F selaku Kepala Dinas Kominfo Kab. Soppeng mengenai keamanan data.

“Kita masih menyimpan secara IT untuk dikelola dipersandian. ada namanya seksii coba kita lihat. Seksi pengolahan dan keamanan data, ada seksi yang menangani itu dimana disini datanya bagaimana data itu tersimpan dengan aman. Baik dari sisi orang yang tidak bertanggung jawab maupun aman dari sisi gangguan virus atau apa. Jadi ada bagian yang menangani itu.”

Berdasarkan pernyataan Bapak F selaku Kepala Dinas Kominfo Kab. Soppeng diatas, menunjukkan bahwa penyimpanan dan pemeliharaan terhadap keamanan data dilaksanakan oleh Bidang Statistik dan Persandian oleh Dinas komunikasi dan informatika. Pemeliharaan terhadap keamanan data tersebut disimpan menggunakan teknologi IT

D. Pelaksanaan *Smart Government* Di Kabupaten Soppeng

Gambaran Umum *Smart government* Di Kabupaten Soppeng. *Smart government* merupakan salah satu dimensi dari *smart city*, pelaksanaan *Smart government* di Kabupaten Soppeng telah diatur dalam

Perda tentang penyelenggaraan pelayanan publik No. 15 tahun 2017 pada Bab V pasal 34 ayat (2). Program pelayanan publik yang dikemas dalam kerangka *e-government* untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Soppeng yang “melayani dan lebih baik”. Terdapat beberapa program di Kabupaten Soppeng tentang penyelenggaraan pelayanan publik ditransformasi ke pelayanan yang bersifat efisien dan efektif dalam kerangka elektronik. Untuk mengetahui lebih jelas terkait rencana program tersebut dan tujuan yang ingin dicapai. Berikut pernyataan dari Bapak KR selaku Bupati Kabupaten Soppeng :

“Kewajiban pemerintah sebagai pelayan masyarakat itu sangat penting untuk berbuat secara maksimal dengan cara berinovasi. Salah satu upaya untuk bagaimana sistem informasi yang begini cepat ditangkap untuk memudahkan masyarakat. Nah kondisi sekarang banyak cara yang dapat kita lakukan, melalui aplikasi, melalui pelayanan satu atap, kemudian informasi-informasi berbasis aplikasi inikan sudah bisa kita akses sehingga kewajiban kita bisa terpenuhi, dengan cara seperti itu memudahkan masyarakat untuk pelayanan disemua tempat-tempat publik. Kita itu pelayan publik kita bagaimana caranya memudahkan sama ji pelayanan satu atap misalnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu itukan kita lihat sendiri, contohnya kemajuan-kemajuan, semua ini kita lakukan semata-mata untuk eee pelayanan masyarakat jadi banyak cara, banyak inovasi yang kita lakukan semua itu bermuara pada kepentingan masyarakat. Kewajiban kita sebagai pelayan masyarakat kita bisa terpenuhi semua bertahap. Ya sederhana target kita bahwa tolak ukur target kita tercapai atau tidak, kita melihat dari kepuasan masyarakat”

Berdasarkan pernyataan Bapak KR diatas bahwa pelaksanaan *smart government* di Kabupaten Soppeng dilatarbelakangi oleh bagaimana pemerintah Kabupaten Soppeng menyadari perannya sebagai pelayan dalam masyarakat, bahwa pentingnya kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah, dan menyadari

bahwa perkembangan informasi dan teknologi yang dinamis tak dapat dipungkiri saat ini, sehingga pemerintah Kabupaten Soppeng membuat kebijakan-kebijakan khususnya dalam sistem pelayanan publik yang bersifat efektif dan efisien melalui inovasi-inovasi penggunaan teknologi informasi.

1. Prosedur Pelaksanaan

Prosedur pelaksanaan merupakan bagian dari rangkaian kerangka pelaksanaan sebuah program kegiatan, melalui aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya, dalam pelaksanaan kebijakan *smart government* Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak KR pelaksana *smart government* seluruhnya dilaksanakan oleh dinas komunikasi dan informatika dan adapun SKPD lain tetap berkoordinasi dalam hal mengelola data dan informasi yang akan di publikasikan kepada masyarakat. “Jadi kalau misalnya, ini dilaksanakan oleh kominfo”. ujar Bupati Soppeng.

Kemudian diperjelas oleh Bapak F selaku Kepala Dinas Kominfo Kab. Soppeng :

“Dinas Kominfo itu dibentuk pada tahun 2017, dibentuk dengan tipe B yang terdiri dari kepala Dinas, ada sekretaris kemudian dibantu oleh tiga kepala bidang. Didalam tiga kepala bidang ini yang terdiri dari ada bidang statistik sandi, bidang penyelenggaraan *e-government*, dan bidang pengelolaan informasi dan saluran komunikasi publik kemudian dibantu oleh masing-masing tiga kepala seksi, inilah yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di kabupaten Soppeng secara kelembagaan.”

Pernyataan diatas bahwa Dinas Komunikasi Dan Informatika merupakan salah satu SKPD yang baru dibentuk yakni pada tahun 2017 dengan tipe B yang berfungsi mengelola seluruh informasi yang terkait dengan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Soppeng. Secara struktural, dinas Kominfo terdapat tiga bidang yang saling terkait hubungannya dengan pengelolaan data dan informasi, dimana salahsatunya terdapat bidang khusus mengenai pelaksanaan *e-government* yaitu bidang pelaksanaan *e-government*. Terkait dengan pelaksanaan *e-government* kominfo juga telah bekerjasama dengan LPSE (Lembaga Pengadaan secara Elektronik).

Berikut penjelasan Bapak F selaku Kepala Dinas Kominfo Kab. Soppeng (kepala dinas kominfo).

“Kepala bidangnya turut dibantu oleh 3 kepala seksi, kasi infrastruktur dan teknologi, kasi pemberdayaan dan informatika, dan kepala seksi layanan *e-government* bekerjasama dengan layanan pengadaan LPSE, tetapi tidak berjalan sendiri, makanya dikominfo ini, ini merupakan satu kesatuan. Tidak bisa bahwa mengatakan *e-government* yang melaksanakan. Berkaitan dengan judulnya ini ee tentang *smart government*. Ketika berbicara tentang teknologinya ini *e-government* tetapi ketika berbicara keterbukaan informasi kita berbicara pengelolaan informasi ini. jadi masing-masing punya bagian tapi ada kaitan. Jadi berbicara mengenai publikasi informasi disini (kabid 1), berbicara mengenai ITnya disini (kabid 2) berbicara masalah data disini (kabid 3). Jadi ada keterkaitan satu dengan yang lainnya, tidak bisa kita berbicara mengatakan bahwa kita berbicara *smart government* hanya kepala bidang *e-government* saja”

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa data dan informasi yang dikelaola dikerjakan oleh bidang masing-masing yang saling bekerjasama sebelum data dan informasi itu di publikasikan kepada masyarakat. Seluruh bidang memiliki bagian yang bekerja

berdasarkan fungsi masing-masing namun semua bidang saling terkait dan bekerjasama dalam pelaksanaan *Smart Government*. Tiga bidang yang dimaksud adalah bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, bidang Penyelenggaraan *e-government*, dan bidang Statistik dan Persandian. Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Saluran Komunikasi Publik berfungsi sebagai peliput dan pengolahan data, bidang Penyelenggaraan *e-government* berfungsi sebagai operator sistem IT, dan bidang Statistik dan Persandian berfungsi sebagai penyimpan dan keamanan data.

2. Manajemen Sumber Daya Manusia

Dalam menganalisis tentang pelaksanaan sebuah program tentu tidak lepas dari sumber daya manusia, yang dapat dilihat dari segi jumlah dan kemampuan. Pelaksanaan *smart government* Pemerintah Kabupaten Soppeng dilihat dari segi sumber daya manusia, masih ditemukan beberapa kendala terkait dengan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi.

Berikut pernyataan Bapak KR:

“Inikan teknologi dinamis, kemudian juga terkadang eee *maintenance*-nya, kemudian juga SDM jadi kita harus selalu mengikuti perkembangan, harus mempunyai keterampilan pengelolaanya yang memadai.”

“Tapi yang menjadi kendala itu kalau pelakunya ini tidak mampu memahami ada perubahan ee perkembangan dia tidak paham.”

Sesuai dengan informan I, namun lebih spesifik dijelaskan oleh Bapak F selaku Kepala Dinas Kominfo Kab. Soppeng:

“Yang pertama dulu tentu SDM-nya masih terbatas, baik terbatas jumlah maupun kemampuan jadi dua itu jumlah dan kemampuan. Yang kedua dari sisi pendanaan yang namanya pemerintah daerah itu dana semua terbatas. Dalam artian pemerintah daerah itu membagi dana perbulannya harus mengkoordinir semua kebutuhan masyarakat.”

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa kemampuan dalam menggunakan teknologi IT dan jumlah Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan *smart government* pemerintah Kabupaten Soppeng masih terbatas, serta kemampuan dari sisi pendanaan sangat terbatas.

3. Infrastruktur

Infrastruktur fisik pendukung *smart government* pemerintah Kabupaten Soppeng. Berikut pendapat dari Bapak F selaku Kepala Dinas Kominfo Kab. Soppeng :

“Infrastruktur yang dikelola Dinas Kominfo jadi pada tahun pertama itu infrastruktur masalah jaringan ya, masalah jaringan baru 16 titik monior yang CCTV tadi. Yang kedua adalah ke BKD dimana jaringan ke BKD itu adalah ujung-ujungnya ke absensi pegawai ASN itu tahun pertamanya pelaksanaan itu. Tahap ke dua infrastruktur yang kita bangun adalah membangun infrastruktur untuk terintegrasinya semua SKPD kedalam kantor ini itu sudah tahun ke dua. Rencana tahun ke tiga ini di 2018 adalah infrastruktur untuk semua kecamatan jadi itu secara bertahap.”

Dari pernyataan tersebut ditemukan bahwa pengadaan infrastruktur oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng yaitu dilakukan secara bertahap menjadi tiga tahap pengadaan yaitu pada tahun pertama infrastruktur jaringan yang hanya mampu menghubungkan 16 titik pantau monitor CCTV ke ruang SCC, tahun ke dua menghubungkan jaringan ke Badan Kepegawain Daerah (BKD) untuk absensi pegawai dan tahun

ketiga pengadaan infrastruktur jaringan ke seluruh kecamatan di Kabupaten Soppeng.

Tahapan tersebut merupakan strategi pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mengelola dana pengadaan yang terbatas. Berikut pernyataan Bapak F selaku Kepala Dinas Kominfo Kab. Soppeng.

“Tetap jalan, semua jalan dengan kondisi yang ada. Pendanaan terbatas, personil terbatas, terbatas dalam artian jumlah dan kemampuan. Tetap semua jalan. Justru kemarin kami dikunjungi dari Sindo katanya “Loh, dananya disini sedikit sekali, lompatannya termasuk SCC itu, eee” bayangannya dia sekian miliar pengadaan itu. Padahal hanya 1 Miliar sudah jalan. Tapi jalannya sudah maksimal dari ukurannya orang luar. Ukuran kita belum. Seandainya kita dikasi dana lebih dari itu, lebih lagi. Sama dengan Makassar umpamanya toh. Mereka berjalan itu dananya 10 Milyar baru bisa jalan seperti SCC. Kita 1 Miliar sudah jalan. Jadi, kita berdayakan sesuai kemampuan. Juga melakukan penghematan. Penghematannya dimana? Ya, kita gunakan ethernet. Kalau tagihan di Makassar 400 juta setiap bulan. Kita tagihannya tidak ada untuk pemanfaatan internetnya. Ada internet digunakan juga, yaa digunakan secara umumlah.”

Penyataan diatas menunjukkan optimisme pelaksana dengan keterbatasan dana dan keterbatasan kemampuan SDM namun tetap mampu berjalan meski belum maksimal. Dengan melihat perbandingan program *Smart Government* Kota Makassar yang sepenuhnya menggunakan jaringan internet yang sehingga memiliki beban biaya jaringan perperiode bulan sehingga perkiraan biaya akan lebih besar, untuk itu pemerintah Kabupaten Soppeng menggunakan teknologi jaringan Ethernet untuk penggunaan internal dalam mengelola data dan informasi.

Jaringan Ethernet adalah jaringan lokal area yang dipancarkan menggunakan frekuensi radio sehingga memungkinkan untuk menggunakan biaya yang murah tanpa dibebani oleh tagihan layanan jaringan. Berikut pernyataan Bapak F selaku Kepala Dinas Kominfo Kab. Soppeng :

“Ada namanya ethernet dan internet. Itulah ketika kita berbicara tentang ethernet. Kita berbicara tentang jaringan dan radio. Pemancar radio. Jadi semua CCTV yang ada didalam kota itu tidak pakai internet. Tidak ada beban untuk membayar ke telkom kemana. Tidak ada. Tapi kita menggunakan radio pemancar masuk ke SCC. Mungkin satu satunya di Indonesia menggunakan ethernet. Kalau di Makassar pakai internet. Ketika menggunakan internet ada tagihan. Ada kewajiban Pemda setiap bulan. Kalau kita tidak ada kewajiban lagi Pemda kesana.”

Pernyataan tersebut menunjukkan kemampuan pemerintah Kabupaten Soppeng dalam melakukan perbandingan-perbandingan tentang pengelolaan sistem e-government yang ada pada daerah lain sehingga memunculkan ide-ide baru dalam menerapkan kebijakan terkait Smart Government.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan *smart government* di Kabupaten Soppeng merupakan program pemerintah dalam mewujudkan visi pemerintah Kabupaten Soppeng yaitu pemerintah yang melayani dan lebih baik. Berdasarkan hasil penelitian ini tentang pelaksanaan *smart government* di Kabupaten Soppeng di simpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan *online service* di Kabupaten Soppeng memanfaatkan teknologi informasi (IT) namun beberapa jenis layanan masih ditemukan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga program-program masih berjalan dengan tidak maksimal dan kecendrungan masyarakat memilih cara-cara manual dalam mendapatkan pelayanan administrasi oleh karena faktor-faktor pendukung utama terkait dengan jaringan dan kemampuan personal dalam menggunakan perangkat IT masih dapat dikatakan kurang.
2. Pelaksanaan *open government* di Kabupaten Soppeng dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Data dan informasi tentang keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah yang di sajikan melalui tahap-tahap proses pengolahan sebelum dipublikasikan. Informasi yang dapat diakses melalui situs website dan beberapa aplikasi berisi data dan informasi telah memenuhi sistem kelengkapan instrumen keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah Kabupaten Soppeng yaitu adanya data

data laporan keuangan, laporan kegiatan dan informasi potensi-potensi daerah.

B. Saran

Adapun masalah-masalah yang penulis temukan saat melaksanakan penelitian ini diperoleh saran atau masukan sebagai berikut :

1. Diharapkan pelaksanaan *online service* dan *open government* untuk disosialisasikan kepada masyarakat secara intens terkait adanya aplikasi-aplikasi dan website serta akun-akun media sosial yang dimiliki pemerintah Kabupaten Soppeng dan SKPD
2. Memaksimalkan penggunaan jaringan ethernet pada ruang SCC sehingga dapat memenuhi seluruh kebutuhan komunikasi dan informasi di seluruh SKPD pemerintah Kabupaten Soppeng secara menyeluruh. Penggunaan jaringan tersebut dinilai mampu mengurangi biaya operasional dalam hal pemakaian jaringan.
3. Memaksimalkan program-program yang berkaitan langsung dengan masyarakat dalam hal program cepat tanggap darurat melalui layanan call centre atau mappajappa, pemadam kebakaran cepat tanggap.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin. (2017). *Launching LaSide, DPM PTSP Soppeng Gelar Sosialisasi Pelayanan Publik*. Soppeng: La Temmamala News.
- Arsana, I. P. (2016). *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Asriadi. (2015). *Inovasi Andi Soetomo, Bupati Soppeng, Sulawesi Selatan*. Soppeng: Jawa Pos.
- Eka, R. (2017, Oktober 9). *Implementasi Riil Smart City Tidak Hanya untuk Kota Besar, Kabupaten Soppeng di Sulawesi Selatan Membuktikannya*.
- Enceng, & Hidayat, A. (2016). Peningkatan Layanan Publik melalui *Smart government and Smart Mobility*. *Jurnal Administrasi Pembangunan, Volume 4, Nomor 2, Maret 2016, hlm. 87-156*, 87-156.
- Esabella, S. (2016, Februari 6). *Menuju Konsep Smart City*. Retrieved Oktober 31, 2017, from Dosen Program Studi Teknik Informatika Universitas Teknologi Sumbawa – sesabella@gmail.com
- Fitriani.B. (2014). *Efektivitas e-service (pelayanan on-line) di Pemerintah Daerah*. Dipetik April 10, 2018, dari ebook.repo.mercubuana-yogya.ac.id
- Habibie, B. J. (2016). *Melesat atau Kandas? New Indonesia dari Smart City menuju Smart Nation*. Jakarta: PT Elex Media Komputer
- Hartina. (2017). *Smart Governance (Studi Kasus Pada Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Bone*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Hendraningrat, D. K., & Setiawan, D. (2017). *Roadmap Broadband Indonesia menuju Era Teknologi 5G*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Machfoedz, I. (2014). *Metodologi Penelitian (Kuantitatif & Kualitatif)*. Yogyakarta: Fitramaya.
- Mursalim, S. W. (2017). Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi Volume 14 No. 1 Juni 2017*, 126-138.
- Perda. (2017). *Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 15 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan publik*. Dipetik April 7, 2018, dari <http://jdih.Soppengkab.go.id>

- Pongsapan, F. P., Rindengan, Y. D., & Najooan, X. B. (2014). Desain Arsitektur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Manado Smart city; Studi Kasus Pemerintah Kota Manado. *e-journal Teknik Elektro dan Komputer (2014)*, ISSN: 2301-8402 , 1-7.
- Perda. (2017). *Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 15 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan publik*. Dipetik April 7, 2018, dari <http://jdih.Soppengkab.go.id>
- PP. (2017). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.38 tahun 2017 tentang inovasi daerah*. Dipetik April 7, 2018, dari <http://setkab.go.id>
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik Vol. 11; No. 01; 2017; 1-12* , 1-12.
- Rizka, O. (2017). *Implementasi Smart City di Kota Malang*. Malang: Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang.
- Sakti, S. P. (2017). *Pengantar Teknologi Sensor*. Malang: UB Press.
- Salusu, J. (2015). *Pengambilan Keputusan Strategi untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Saputra, P. (Director). (2017). *Soppeng Command Center (SCC)* [Motion Picture].
- Scassa, T. (2014, Juni 2). Privacy and Open Government. *Future Internet 2014*, 6(2), doi:10.3390/fi6020397 , hal. Future Internet 2014, 6(2), 397-413; doi:10.3390/fi6020397.
- Soppeng, P. (2017). *Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017*. Watansoppeng: Pemda Soppeng.
- Sucoko, B. M. (2007). *Manajemen Administrasi Perkatoran Modern*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukwiat, Jamal, S., & Sukamto, S. (2006). *Ekonomi*. Aceh: Yudistira.
- Sulila, I. (2015). *Implementasi Dimensi Pelayanan Publik dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Supangkat, S. H. (2015). *Smart City Invitiatives*. Retrieved Oktober 10, 2017, from Smart City Invitiatives: www.un.org

- Tampubolon, L. P. (2016). Pemeringkatan *E-government* Indonesia (PEGI) dan Pemanfaatan Teknologi Informais di DKI Jakarta. *Jurnal Sistem Informasi (JSI)*, VOL. 8, NO. 2, Oktober 2016 , 1121-1132.
- UGM, P. (2016). Road Map Kota Yogyakarta menuju Smart City. *Working Paper PSPPR* , 1-27.
- Utomo, C. E., & Hariadi, M. (2016). Strategi Pembangunan Smart City dan Tantangannya bagi Masyarakat Kota. *Jurnal Strategi dan Bisnis Vol. 4, No. 2* , 159-175.
- Wahab, S. A. (2016). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widayat, A. P., Munandar, M. A., & Sumarto, S. (2017). Kinerja Birokrasi Pemerintah dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat dengan Aplikasi Quick Response dan WEB Di Kantor Kelurahan Kalisegoro Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Unnes Political Science Journal Vol. 1, No. 2, January 2017* , 98-106.
- Yuhefizar. (2008). *10 Jam Menguasai internet : Teknologi dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

RIWAYAT HIDUP



Irfan, lahir di Cangkange Kelurahan Ujung Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 9 Agustus 1992. Anak Sulung dari tiga bersaura, putra dari pasangan Tarmini dan Mawi. Penulis menempuh pendidikan di SDN 118 Ujung dari tahun 1998-2005. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Lilirilau 2005-2008. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Lilirilau selama tiga tahun dan tamat pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Program Studi Administrasi Negara (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Selama perkuliahan penulis mengikuti beberapa organisasi kampus diantaranya menjadi kader Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tapak Suci Putra Muhammadiyah Cabang 43 Makassar, dan pengurus Badan Semi Otonom (BSO) Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara (HUMANIERA) bidang pengembangan kemampuan berbahasa Inggris, Centre of English Studies CESIST humaniera periode 2015/2016. Pada tahun 2018 penulis berhasil mempertanggung jawabkan hasil karya ilmiah di depan penguji yang berjudul “Pelaksanaan *Smart Government* di Kabupaten Soppeng” dan mendapatkan gelar S.Sos.

Lampiran 1

Transkrip Wawancara

Narasumber I

Bupati Soppeng sebagai pengambil keputusan tentang *Smart Government* :

1. Apa yang melatarbelakangi/menginspirasi munculnya ide untuk menerapkan *smart government* dalam Soppeng menuju *smart city* ?
2. Apa program-program bapak dalam mewujudkan *smart government* ? (seperti apa *Online service* dan *Open Government* yang ada)
3. Siapa yang menjadi pelaksana dari setiap program tersebut ? (bagaimana tugas, peran, dan fungsinya)
4. Dalam penerapan terkait *Online service*, bagaimana cara untuk mendapat pelayanan online (*Online prosedur*)?
5. Dalam penerapan terkait *Online service*, bagaimana prosedur pembayaran elektrik (*E-benefits payment*) yang diterapkan ? (apa saja pelayanan yang sudah menerapkan *e-benefits payment* ?)
6. Dalam penerapan terkait *Open Government* (transparansi dan akuntabilitas) data apa saja yang akan dan telah di publikasikan ?
7. Bagaimana target yang ingin dicapai dalam program-program *smart government* tersebut ?
8. Bagaimana strategi yang bapak lakukan dalam mewujudkan *smart government* ?
9. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan program *smart government* ? (infrastruktur, pendanaan, manajemen SDM)

Narasumber II

Dinas Kominfo, terkait dengan open government (*open data* dan *open apps*)

1. Bagaimana peran Dinas Kominfo dalam mengelola informasi yang akan di sajikan kepada masyarakat?
2. Informasi apa saja yang disajikan ? (transparansi, potensi, laporan kinerja, dll)
3. Dalam bentuk apa data dan informasi di sajikan ? (apakah dalam bentuk website, aplikasi, dsb)
4. Siapa yang mengelola data yang akan dipublikasi ? (dari mana data/ informasi tersebut diperoleh)
5. Dalam hal aplikasi, produk-produk apa yang dihasilkan dalam mendukung *smart government*? (Baik itu di kominfo maupun pada instansi lain)
6. Jika dalam bentuk aplikasi, siapa yang mengelola aplikasi tersebut dan bagaimana mekanisme pengelolaan aplikasi tersebut? (Baik itu di kominfo maupun pada instansi lain, bagaimana fungsi dan apa tujuan aplikasi tersebut ?)
7. Bagaimana alur-alur atau cara masyarakat dalam memperoleh pelayanan secara online ? (khusus pada pelayanan online)

Terkait dengan privasi :

1. Bagaimana sistem keamanan yang diterapkan dalam memberikan dan memperoleh informasi atau data dalam suatu program? (aplikasi, website dsb apakah dilakukan verifikasi data dsb)
2. Adakah teknologi khusus yang digunakan untuk melindungi keamanan data? (khusus untuk serangan virus atau hacker)
3. Untuk pengguna, aturan atau ketentuan apa yang harus di patuhi dalam mengakses informasi yang dibutuhkan ?
4. Dari segi teknis, kendala apa yang sering ditemukan dalam mengelola informasi ? (segi manajemen SDM, infrastruktur maupun pengelolaan data sebelum di sajikan)

Narasumber 3

Mengetahui informasi tentang pelaksanaan *smart government* di kantor bupati kabupaten Soppeng.

1. Bagaimana pelaksanaan *online service* di bidang administrasi pemerintah Kabupaten Soppeng?
2. Bagaimana pelaksanaan *open government* di di bidang administrasi pemerintah Kabupaten Soppeng?

Narasumber 4

Mengetahui informasi tentang pelaksanaan *smart government* di kantor BKPD kabupaten Soppeng.

1. Bagaimana pelaksanaan *online service* di BPKD Kabupaten Soppeng?
2. Bagaimana pelaksanaan *open government* di BPKD Kabupaten Soppeng?

Narasumber 5

Mengetahui informasi tentang pelaksanaan *smart government* pada layanan aplikasi LaSIDE pad a kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Soppeng.

1. Apa aplikasi LaSIDE itu ?
2. Seperti apa layanan yang dapat di peroleh didalamnya ?
3. Sejauh mana aplikasi ini di gunakan oleh masyarakat ?
4. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang aplikasi tersebut ?
5. Apa kendala yang sering di temui dalam program ini ?

Narasumber 6

Mengetahui informasi tentang pelaksanaan *smart government* di kantor BKPD kabupaten Soppeng tentang aplikasi PADDARE.

1. Apa aplikasi PADDARE itu ?
2. Seperti apa layanan yang dapat di peroleh didalamnya ?
3. Sejauh mana aplikasi ini di gunakan oleh masyarakat ?
4. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang aplikasi tersebut ?

Narasumber 7

Mengetahui informasi tentang pelaksanaan *smart government* di Kabupaten Soppeng tentang program layanan pemberian bantuan melalui sistem kartu terpadu dinamakan “kartu macca”

1. Bagaimana fungsi dan tujuan program kartu macca ini ?
2. Bagaimana cara penggunaan kartu macca ini ?
3. Siapa saja yang berhak dan sudah berapa banyak masyarakat yang mendapatkan kartu macca ?
4. Bagaimana cara penyalurannya ?
5. Apa kelebihan dan kekurangan kartu macca ini ?

Hasil Wawancara

Rekaman Bapak KR selaku Bupati Soppeng

Saya lihat ada Perda tentang penyelenggaraan pelayanan publik dalam kerangka elektronik government. Saya tertarik mengenai pelaksanaan *smart government* dalam mencapai Soppeng *smart city*. *Smart government* adalah salah satu dimensi dari *smart city*. Nah yang menjadi ketertarikan yaitu beberapa program-program yang baru di Soppeng. Mulai dari 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan publik ditransformasi ke pelayanan yang bersifat efisien dan efektif dalam kerangka elektronik.

- Apa yang melatarbelakangi atau menginspirasi dalam mencapai Soppeng *smart city*?

“Jadi pada dasarnya sebenarnya kewajiban pemerintah sebagai pelayan masyarakat itu sangat penting untuk berbuat secara maksimal dengan cara berinovasi. Salah satu upaya untuk bagaimana sistem informasi yang begini cepat ditangkap untuk memudahkan masyarakat. Nah kondisi sekarang banyak cara yang dapat kita lakukan, melalui aplikasi, melalui pelayanan satu atap, kemudian informasi-informasi berbasis aplikasi inikan sudah bisa kita akses sehingga kewajiban kita bisa terpenuhi, dengan cara seperti itu memudahkan masyarakat untuk pelayanan disemua tempat-tempat publik. Kita itu pelayan publik kita bagaimana caranya memudahkan sama ji pelayanan satu atap misalnya dinas penanaman odal dan pelayana terpadu itukan kita lihat sendiri, contohnya kemajuan-kemajuan, semua ini kita lakukan semata-mata untuk eee pelayanan masyarakat jadi banyak cara, banyak inovasi yang kita lakukan semua itu bermuara pada kepentingan masyarakat. Kewajiban kita sebagai pelayan masyarakat kita bisa terpenuhi semua bertahap.”

- Bagaimana bentuk program yang diwujudkan dalam rangka *smart government* ?

“Inikan salah satunya yang ada disebelah ini, sistem informasi pelyanan publik, ya yang ada disebelah termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan, perekonomian, pelayanan KTP, rumah sakit semua”

- Maksudnya SCC ini fungsinya seperti apa Pak ?

“Ya disamping kita memonitor, mengontrol dan menyampaikan, jadi banyak hal manfaat yang bisa kita dapatkan dengan program ini”

- Siapa yang menjadi pelaksana dari program ini?

“Jadi kalau misalnya ini ada kominfo”

- Apakah ada tim ahli ?

“Ada, untuk lebih jelasnya tanyaki kominfo, kerjanya bagaimana, infrastruktur, pengorganisasiannya bagaimana karena kitakan takaran kebijakannya”

- Apakah sudah ada pelayanan publik yang bersifat pembayaran elektrik ? tapi kalau pelayanan yang dibayar tidak ada lagi kecuali pajak dan retribusi.

“Belum ada, tapi kalau sistemnya sudah ada sementara kita mau melakukan seperti itu. Seperti inikan inovasi aplikasi pelayanan pajak daerah jadi kita namakan aplikasi itu “PADDARE” jadi dinas penanaman modal misalnya, inovasinya disitu pelayanan gerak berbasis satu pintu.

- Mengenai keterbukaan pemerintah dan akuntabilitas, data-data apa saja yang di publish?

“Kita sudah, melalui aplikasi yang ada di Kominfo dan Bappeda”

- Bagaimana target yang ingin dicapai dalam program-program itu?

“Ya sederhana target kita bahwa tolak ukur target kita tercapai atau tidak, kita melihat dari kepuasan masyarakat, jangan sampai kita merasa hebat ... masyarakat yang merasakan”

- Apakah ada faktor pendukung dan penghambat yang selama ini mungkin muncul ?

“Pertama eee, karena inikan teknologi dinamis, kemudian juga terkadang eee maintenancenya, kemudian juga SDM jadi kita harus selalu mengikuti perkembangan, harus mempunyai keterampilan pengelolaanya yang memadai”

- Bagaimana dengan masalah infrastruktur ?

“Ada juga tapikan standar itu infrastruktur misalnya jaringannya bagaimana. Kan umum bukan lagi hal yang luar biasa. Tapi yang menjadi kendala itu kalau pelakunya ini tidak mampu memahami ada perubahan ee perkembangan dia tidak paham”

Bapak F selaku kepala dinas Kominfo Kabupaten Soppeng

Transparansi dan akuntabilitas pemerintah dikemas dalam teknologi IT. Sesuai dengan arahan Pak Bupati, secara teknis Kominfo ditunjuk sebagai pelaksana dari program yang dicetuskan oleh beliau. Sudah digambarkan secara umum mengenai kebijakannya untuk secara teknis ke arahkan ke Kominfo dan Bappeda.

- Dinas Kominfo sebagai pelaksana dari kebijakan tersebut. Bagaimana peran Dinas Kominfo dalam mengelola informasi yang akan disampaikan ke masyarakat?. Bisa digambarkan secara umum tentang struktur kerja Kominfo? Siapa yang menjadi pelaksana tugas dari tiap-tiap bagian ?

“Dinas kominfo itu dibentuk pada tahun 2017 dibentuk dengan tipe B yang terdiri dari kepala dinas, ada sekretaris kemudian dibantu oleh 3 kepala bidang yang terdiri dari ada bidang statistik sandi ini kelembagaannya terdiri dari, sekretaris dibantu oleh 3 kepala bidang. Dari tiap kepala bidang ini dibantu oleh masing-masing kepala seksi. Jadi kepala dinas, sekretaris, dan masing-masing kepala bidang. Dari 1 kepala bidang dibantu oleh 3 kepala seksi, inilah yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dinas kominfo kabupaten soppeng ini dari sisi kelembagaan”

- Sudah ada pembagian tugas Pak ?

“Iya, sudah namanya ini, sudah masuk sebagai umpamanya yang berkaitan dengan *e-government* berkaitan dengan *e-government* ini. hampir ee *smart government*. *Smart government* ini lebih cenderung kesini (...) yang lainnya sebenarnya ini mendukung, jadi ada namanya kepala bidang penyelenggaraan *e-government*.”

- Khusus tentang *e-government* ?

“Iya inilah kepala bidangnya turut dibantu oleh 3 kepala seksi. Kasi infrastruktur dan teknologi, kepala seksi pemberdayaan dan informatika dan kepala seksi layanan *e-government* kerjasama layanan pengadaan LPSE. Tetapi tidak berjalan sendiri. Makanya dikominfo ini merupakan satu kesatuan, tidak bisa bahwa mengatakan *e-government* yang melaksanakan. Berkaitan dengan judulnya ini tentang *smart government*. Ketika berbicara teknologinya ini *e-government* tapi ketika berbicara keterbukaan informasi kita berbicara dipengelolaan informasi ini. jadi masing-masing ada bagian tapi ada kaitan. Jadi berbicara mengenai publikasi informasi disini (kabid 1), berbicara mengenai ITnya disini (kabid 2) berbicara mengenai data disini (kabid 3). Jadi ada keterkaitan satu dengan yang lainnya, tidak bisa kita mengatakan bahwa ketika berbicara mengenai *smart government* hanya kepala bidang *e government* saja, tidak.”

- Apakah mereka saling terkait ?

“Ya karena berbicara masalah informasi disini (kabid 1) datanya disini”

- Kan begini Pak, ada dua indikator pertama pelayanan publik dan keterbukaan?

“Oke, keterbukaannya itu aplikasi, mengolah data ee mengelolanya dan disitu juga ada masalah statistik dan persandian ee mengenai ITnya disitu”

- Untuk selanjutnya pak dari mana data itu diolah apakah masing-masing bidang misalnya dari bidang sosial ?

“Tidak, data apa dulu ketika masalah pelayanan ini kan ada pengelola informasi inilah yang mengolah informasi itu dan mencari informasi”

- Dari mana data itu diperoleh pak ?

“Tergantung data apa dulu ? bisa dari SKPD, ketika namanya data bisa saja namanya datanya tertulis, foto video. Tertulis bisa dokumennya bisa diambil langsung nanti diolah. Jadi umpamanya ada acara launching, saya kasi gambaran ya, ada acara launching tim saya turun didalam launching itu apa yang mau dipublish. Misalnya sekarang ini launching masalah beras, tim saya turun. Siapa penanggung jawabnya ? dihubungi SKPDnya bahwa akan launching beras, didalam launching beras itu apa saja yang akan ditampilkan jadi, teman-teman dari sini mengambil gambar, setelah mengambil gambar bikin releasen. Releasen setelah kembali kesini kita mempublish di media sosial bisa di FB, dii apa namanya instagram kemudian juga disampaikan ke media yang mempublish juga membantu kami mempublish, begitulah gambarannya”

- Jadi ini dinas kominfo mewadahi semua bidang SKPD ?

“Semua informasi yang berkaitan dengan Kabupaten Soppeng melalui Kominfo”

- Apakah dinas kominfo juga berperan mengelola data mentah ?

“Jadi semua data yang ada baik sudah jadi ada mentah eee begitu bahasanya”

- Jadi kalau sudah ada seperti itu kabid ini (kabid 1) yang mengelolah?

“Iya kabid ini yang mengelolah apakah masih mau diolah, mau dibawa kemana terutama ke media kaitannya kedia banyak-banyak

Jadi diambil dulu itu kalau, kalau soppeng punya misi ee pemerintahan yang melayani dan lebih baik itu tentu jadi targetnya pemerintah daerah yang yang mana pemerintah yang melayani adalah tentu memberikan pelayanan dasar masyarakat dimana pelayanan dasarnya seperti pendidikan, kesehatan, mungkin kebutuhan masalah administrasi kependudukan inilah pelayanan-pelayanan dasar yang diberikan kepada masyarakat itulah implikasi dari pemerintah yang melayani lebih baik”

- Dalam bentuk apa data itu disajikan ? apakah dalam bentuk aplikasi, website ?

“Semua, kita semua menggunakan teknologi, ada website pemda, ada media sosial, masing-masing SKPD ada website juga dikelola oleh SKPD sendiri. Khusus pemda kominfo yang kelola. Jadi disamping ada webnya pemda kita juga SKPD masing-masing ada webnya yang dikelola sendiri tetapi informasi yang disampaikan SKPD ke pemda kita juga kasi masuk ke web pemda. Entah dia masukka di webnya sendiri itu urusannya mereka. Tetapi didalam kami sampaikan ke mereka, apapun aktivitas

apapun informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat disampaikan ke webaik dilaksanakan atau tidak itu urusan mereka. tetapi ketika itu informasi disampaikan ke kami masukkan di web, maupun di media sosial kita akan itu, instagram, FB.”

- Mengenai tentang pelaksanaan program pemerintah, mengenai e-government apakah ada tim khusus atau program khusus ?

“Kalau menghusus belum ada timnya tapi untuk pelaksanaan sudah ada. Mungkin adek sudah lihat di atas”

- Saya belum masuk pak, tapi saya lihat di website.

“Ya itu di SCC itu merupakan aplikasi dari pemerintah yang melayani dan lebih baik. Kenapa kami katakan itu aplikasinya ? itu karena disitulah pak bupati walaupun tinggal diruangnya dia bisa mengontrol itu, semua tempat-tempat pelayanan umum. SCC itu, karena disitu kelihatan ada 16 titik monitor yang berkaitan dengan pelayanan dasar tadi sebagai mana yang saya sampaikan ada di RS, ada dinas sosial, ada di pelayanan KTP, ada di pelayanan satu atap ini”

- Semua SKPD telah terhubung pak ?

“Belum semua SKPD, tetapi kami sudah siapkan jaringannya sudah terhubung di SKPD kawasan kantor ini”

- SKPD apa yang sudah terhubung ?

“Itu tadi yang pelayanan-pelayanan umum dulu”

- Yang misalnya di kependudukan ?

“Ya di kependudukan, di RS ya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pelayanan langsung ke masyarakat.

- Saya lihat fungsionalitas SCC itu seperti kartu macca call centre ?

“Call centre ada untuk pemadam kebakaran, PSC, ambulans, berkaitan dengan kegawat darurat”

- Termasuk mungkin kepolisian ?

“Kepolisian ee itu diluar pemda kita ini hanya didalam pemda tok dikelola tetapi berkordinasi tetap jalan kerjasamanya”

- Kalo kartu macca pak ?

“Kartu macca di dinas sosial”

- Tapi bagaimana kaitannya dengan SCC apakah terhubung?

“Eee untuk sampai hari ini belum terhubung”

- Saya lihat ada juga websitenya pak ?

“Ya itu di dinas sosial yang kelola”

- Bagaimana caranya masyarakat dalam mengakses itu pak ?

“Langsung ke Dinas Sosial. Diambil di dinas Sosial, nanti disitu disampaikan”

- Bagaimana fungsi dari kartu macca ?

“Apakah digunakan untuk besiswa, apakah digunakan untuk kesehatan, bantuan sosial untuk lebih jelasnya bisa dilanjutkan ke dinas sosial secara teknis”

- Mengenai keamanan data pak, atau privasi apakah dalam memberikan informasi berupa aplikasi atau web kepada masyarakat ?

“Yaa setelah kita kita lempar ke web itukan sudah milik masyarakat”

- Bagaimana cara-cara masyarakat untuk mengakses ?

“Langsung dibuka saja”

- Karena ada juga informasi yang bersifat harus membuat ID misalkan dulu baru bisa diakses ?

“Yang jelasnya ketika kita masukkan di web itu sudah bebas diakses”

- Sudah terbuka begitu ?

“Terbuka, jadi memang ada informasi yang belum bisa disampaikan ke masyarakat itulah bagian dari informasi yang belum bisa diinformasikan. Jadi kita proses, jadi umpamanya dalam penyusunan anggaran ada tahapan. Didalam rancangan anggaran belum bisa kita lempar keluar karena itu adalah rancangan, masih bisa berubah. Jangan sampai rancangan itu masyarakat menjadikan dasar bahwa eih APBDnya Soppeng ee apa anggaran untuk jalan ini sudah ok dalam APBD padahal masih dalam rancangan. Didalam prosesnya itu rancangan bisa saja dihapus bisa ditambah, bisa tetap. Ee itulah informasi-informasi yang dalam proses tidak bisa disampaikan ke masyarakat. Kenapa ? karena itu tadi, bahwa bisa dihilangkan bisa informasi itu tidak jadi, informasi itu lanjut atau informasi itu bertambah. Jadi istilahnya masih bisa berubah itu informasi. Ketika informasi masih bisa dirubah maka tidak bisa dipublish”

- Adakah teknologi khusus yang digunakan dalam perlindungan data dari serangan virus atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab, heacker misalnya ?

“Kita masih masih menyimpan secara IT untuk dikelola dipersandian. ada namanya seksii coba kita lihat. Seksi pengolahan dan keamanan data, ada seksi yang menangani itu dimana disimpan datanya bagaimana data itu tersimpan dengan aman. Baik aman dari sisi orang yang tidak bertanggung jawab maupun aman dari sisi gangguan virus atau apa. Jadi ada bagian yang menangani itu”

- Dari segi kendala apa yang sering ditemukan, baik dari SDM infrastruktur ?

“Yang pertama dulu tentu SDMnya masih terbatas. Baik terbatas jumlah maupun kemampuan jadi dua itu jumlah dan kemampuan, yang ke dua dari sisi pendanaan, yang namanya pemerintah daerah itu dana semua terbatas. Dalam artian pemerintah daerah itu membagi dana perbulannya harus mengakomodir semua kebutuhan masyarakat. Berbicara masalah penting atau tidak itu tergantung siapa yang mengatakan. Ketika berbicara masalah komunikasi dan informasi, pasti saya mengatakan komunikasi dan informasi penting. Saya butuh dana sekian banyak. Tetapi berbicara masalah pertanian, saya juga penting karena masyarakat butuh makan. berbicara diorang kesehatan, pasti mengatakan walaupun kamu mau makan tetapi ketika tidak sehat itu tidak bisa juga. Jadi semuanya merasa penting. Tapi untuk menghindari keegoan dari semua itu yaa diaturlah anggaran itu dikondisikan. Kapan memang kesehatan harus banyak, kapan pendidikan harus banyak, kapan komunikasi dan informasi banyak. itulah tugasnya anggaran yang mengatur itu. Siapa yang memang diprioritaskan pada tahun itu prioritasnya apa. Tidak ada istilah yang mendominasi”

- Itu untuk pendanaan dan SDM, selanjutnya mengenai infrastruktur pak misalkan jaringan ?

“Jadi khusus untuk infrastruktur yang dikelola oleh dinas kominfo, jadi pada tahun pertaa itu infrastruktur masalah jaringannya, masalah jaringan itu baru ke 16 titik monitor yang di CCTV tadi. Yang kedua adalah untuk jaringan ke BKD. Dimana jaringan ke BKD itu adalah ujung-ujungnya ke absensi pegawai ASN itu. Tahun pertamanya pelaksanaan itu. Tahap kedua infrastruktur yang kita bangun adalah membangun infrastruktur untuk terintegrasinya semua SKPD ini kedalam kantor ini. itu sudah tahun kedua. Rencana tahun ketiga ini di 2018 adalah membangun infrastruktur untuk semua kecamatan. Jadi itu secara bertahap. Pertama dulu pementauan CCTV dengan BKD yang kedua semua SKPD dan yang ketiga ke kecamatan. semua nanti akan terhubung ke satu anu saja, lembaga bersentral ke SCC”

- Melalui jaringan apa itu pak ?

“Ee ada melalui itu, kita pakai fiber optic, kabel sendiri”

- Tidak bekerja sama dengan telkom ?

“Belum. Jadi nanti kedepan begini. Kita ada 2 memang. Ada namanya ethernet dan internet. Itulah ketika kita berbica tentang ethernet. Kita berbicara tentang jaringan dan

radio. Pemancar radio. Jadi semua CCTV yang ada didalam kota itu tidak pakai internet. Tidak ada beban untuk membayar ke telkom keman. Tidak ada. Tapi kita menggunakan radio pemancar masuk ke SCC. Mungkin satu satunya di Indonesia menggunakan ethernet. Kalau di Makassar pakai internet. Ketika menggunakan internet ada tagihan. Ada kewajiban Pemda setiap bulan. Kalau kita tidak ada kewajiban lagi Pemda kesana”

- Seperti itu mungkin kelebihanannya menggunakan ethernet ?

“Kalau masalah kuat kelemahnya jaringan justru lebih bagus jaringannya karena menggunakan kabel. Kecuali yang radio kadang ada gangguan kalau cuaca mendung”

- Data dan informasi itu melalui jaringan dan ethernet yang di pancarkan melalui SCC tapi masyarakat yang mengakses tetap melalui internet ?

“Aaa kalau masyarakat itu kita lempar nanti kan ini internet itu adalah untuk penggunaan internal Pemda. Tetapi ketika sudah mau digunakan masyarakat, mau dilempar ke masyarakat itu sudah menggunakan internet anu ee internet karena tidak bisa nyambung kalau bisa. Kalau tidak bisa kita lempar melalui internet. Jadi tetap kita menggunakan internet. Kita padukan antara internet dan ethernet. Jadi ketika berkomunikasi secara internal itu ethernet, kabel kabel yang di pakai.”

- Kembali lagi ke SCC itu bagian dari tim khususkah itu Pak ?

“Tidak, tetap dibawa naungan e-government secara umum dia disitu dikelola ITnya dikelola dengan terkait dengan SKPD apa saja yang mau dipublish. Jadi kita belum ada tim tim khusus. Tidak masalahnya ini Kominfo kan masih baru, baru 1 tahun 8 bulan. Jadi kita masih jalan sambil membenahi, nanti kedepannya kalau memang personil cukup, yaa kita bikin personil khusus, khusus menangani orangnya apa? Menangani apa? Karena kita masih masih personil kita masih terbatas. Makanya itu kendalanya adalah disamping personil terbatas, terbatas dari sisi jumlah, terbatas dari sisi kemampuan. Itulah kendalanya. Tapi tidk bisa dijadikan alasan bahwa dengan keadaan seperti itu tidak jalan. Itu harus tetap jalan. Jangan jangan nanti ditulis bahwa karena keterbatasan ini ini tidak jalan. Tidak. Semua tetap jalan walaupun jalannya tidak maksimal”

- Iya, ini memang an ini muaranya nanti ke pelaksanannya saja belum pada hasilnya.

Karena kan baru 1 tahun.

“Tetap jalan, semua jalan dengan kondisi yang ada. Pendanaan terbatas, personil terbatas, terbatas dalam artian jumlah dan kemampuan. Tetap semua jalan. Justru kemarin kami dikunjungi dari Sindo katanya “Loh, dananya disini sedikit sekali, lompatannya termasuk SCC itu, eee” bayangannya dia sekian miliar pengadaan itu. Padahal hanya 1M sudah jalan. Tapi jalannya sudah maksimal dari ukurannya orang luar. Ukuran kita belum. Seandainya kita dikasi dana lebih dari itu, lebih lagi. Sama dengan Makassar umpunya toh. Mereka berjalan itu dananya 10 Milyar baru bisa jalan seperti SCC. Kita 1 Milyar sudah jalan. Jadi, kita berdayakan sesuai kemampuan. Juga melakukan penghematan. Penghematannya dimana? Ya, kita gunakan ethernet. Kalau tagihan di Makassar 400 juta setiap bulan. Kita tagihannya tidak ada untuk pemanfaatan internetnya. Ada internet digunakan juga, yaa digunakan secara umumlah”

- Hasilnya kan belum bisa diukur, memang masih baru tapi ini sesuatu yang menurut saya luar biasa karena pertama saya angka judulnya, saya lihat SCC di berita. Mungkin belum mencolok begitu bahwa pelayanan online tapi yang namanya on line kan eee dari jaringan. Meskipun hanya menelpon sudah termasuk bisa dikatakan on line ada call center bisa terhubung di beberapa instansi, mengenai kegawatdaruratan lainnya. Misalnya kartu macca juga itu meng-cover beberapa bidang dari SKPD yang berkaitan langsung dengan Dinas Sosial. Menurut saya itu, sebuah langkah yang luar biasa perubahan yang dilakukan oleh Bupati sekarang. Semoga bisa lebih berkembang.

“Ya akan berkembang. Kalau istilahnya Pak Bupati, saat masuk di Soppeng anda terpantau. Dia maunya seperti itu. Makanya nanti, tahun ini nanti di Kecamatan akan ada CCTV juga ditempat umum. Mungkin di pasar, pertigaan, Kantor Kecamatan. Mungkin 3 ini dulu. CCTV di masing masing kecamatan. Jadi kedepannya itu yang akan masuk Soppeng sudah terpantau. Tapi ini, ini dana terbatas. Kita bertahap pelaksanaannya”

- Semoga kedepannya lebih bisa dikembangkan. Kalau dilihat kondisi masyarakat sekarang apa-apa sudah didalam HP dari anak-anak sudah punya Hp semua. Sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa semua dalam jaringan. Ini sebuah keharusan bagi pemerintah untuk mengikuti perkembangan zaman.

“Iye, In Sya Allah ini kelembagaannya (menunjuk kertas struktur kelembagaan Kominfo) Kominfo. Inilah nama SKPD nya (menunjuk kertas yang lainnya) semua SKPD sudah ada disitu”

- Semuanya ini pak sudah dibawa naungan Dinas Kominfo ?

“Tidak. kita berkoordinasi. Tidak saling menaungi. Kita bertanggung jawab langsung ke Pak Bupati melalui Pak Sekda masing-masing”

- Mengenai webnya juga masing-masing ?

“Memiliki website sendiri yang dikelola masing-masing”

- Itulah aplikasinya pak, lembaga mengendalikan sendiri ?

“Belum terintegrasi. Tetapi kedepannya kita harapkan semua aplikasi terintegrasi. Jadi bisa berkomunikasi melalui jalur kabel dan Pak Bupati nanti kedepannya bisa memantau hanya di SCC. Tidak meninggalkan tempat bisa memantau semua.

- Terus ada juga saya lihat tadi LPSE. Sudah berjalan berapa lama ini Pak? Mengenai e-tendering juga didalamnya. Ada aplikasinya Pak?

“Iyyah. kalau itu di ULP (Unit Layanan Pengadaan) jadi kita mengakomodir saja itu LPSEnya kemudian disampaikan di ULP untuk tenderingnya”

- Ada sistem baru juga Pak, yang dicanangkan Pak Bupati melalui aplikasi “PADDARE” apakah itu dibawa kendali Kominfo?

“Oooh “PADDARE” masih diiii, paddare paddare di pemberdayaan perempuan. Di Dinas Pemberdayaan Perempuan kayanya itu paddare”

- La Side juga Pak?

“La Side di PTSP. Paddare, paddare, di anu. Apa. Pengelola keuangan. Itu masih jalan sendiri-sendiri”

- Saya tanya juga pegawai dibawa. “Belum” katanya

“Belum. Belum terintegrasi, masih jalan. Tapi kedepannya akan terintegrasi semua. Jadi ketika pajak dan retribusi, ketika Pak Bupati butuh informasi, dia tidak harus memanggil orangnya pengelola keuangan. Dia hanya buka aplikasinya”

- Intinya data semua harus tetap tersedia karena di pantau langsung oleh Bupati, begitupun yang dilemparkan ke masyarakat.

“Yaa banyak banyak model aplikasi memang yang dipalai. Tapi untuk sampai hari ini masih jalan sendiri-sendiri. Termasuk La Side mi ini masih jalan sesuai dengan dinasnya”

- Saya coba buka kemarin. Sudah bisa di buka tapi, itukan formulirnya di download dulu, bisa kita tulis sendiri baru dibawa. Tapi saya lihat belum bisa dipakai. Mungkin masih dalam pengembangan ?

“Masih. Masih dalam ini, masih baru 1 tahun. Kita lihat kan kendalanya dimana? Keluhan masyarakat dimana? Itu yang kita akomodir. Ooh kedalanya masyarakat seperti ini. yang jelasnya kita upayakan bagaimana melayani masyarakat. Disamping secara manual kita menggunakan on line juga”

- Saya meneliti untuk pelaksanaanya dulu, prosesnya dulu. Kalau masalah kepuasan dan lainnya, lain juga ceritanya.

“Kalau butuh informasi bisa buka webnya Pemda soppeng.go.id bisa dilihat apa-apa yang sudah ditampilkan. Apakah memang masyarakat butuh tentang data itu ? apakah juga, untuk masukan ke saya toh? Bisa dilihat, apakah masyarakat sudah apa namanya? Sudah menjadi kebutuhan mereka membuka web. Karena itu, masih kurang rasanya masyarakat yang membuka web. Nanti orang butuh baru buka web. Yang banyak dibuka hanya di medsos FB apa, instagram”

- Mungkin SKPD sudah punya medsos sendiri?

“Ada yang punya, ada yang tidak. Tapi web sudah ada. Kalau Kominfo sudah memanfaatkan itu”

- Kalau sekedar saran dari saya, kami berharap bisa sampai dibawalah. Sampai ke Desa misalnya. Seperti di daerah mana itu, sudah ada smart kampung.

“Memang seperti itu harapan kita, tetapi karena kemampuan dana makanya bertahap. Itu yang saya sampaikan tadi”

- Baru rencana akan ke Kecamatan tahun ini?

“Yaaaa nanti di kecamatan baru di lihat lagi. Apakah di kecamatan ini memang masih bisa dikembangkan kemana? Apakah sampai di desa? Setelah di desa dimana lagi? Mungkin di industri rumah tangga. Jadi, mungkin daerah lain ada yang lakukan tapi fokusnya berbeda. Istilahnya kalau dia, kemungkinannya dia fokus, umpamanya pembinaan desa dia fokus. Tetapi belum menyebar ke kecamatan. Tapi kalau kita selalu menyebar”

- Mulai dari atas pertama baru turun hingga ke bawa. Mungkin strateginya berbeda?

“Mungkin sudah ada yang sampai ke kampung, berbedakan? Ada daerah sampai dikampung tapi tidak menyebar ke semua kecamatan. Jadi umpamanya toh, umpamanya Soppeng OK. SKPD umpamanya sosial baru larinya ke Kecamatan Lilirilau, Cabbenge umpamanya. Cabbenge nonno sih ke desa aga toh? Turun lagi ke desanya. Tetapi akhirnya ada kecamatan tidak dapat toh?. Yang kita harapkan ini kecamatan nanti menyebar ini 8 kecamatan. Jadi kita tidak fokus bahwa turun kecamatan, turun ke desa. Akhirnya kecamatan lainnya terabaikan”

- Kita mau menyebar secara merata?

“Iyaa istilahnya merata. Kita upayakan merata dulu termasuk pemanfaatan wifi gratis. Ada wifi gratis di taman kota di Mes Villa Yuliana sama Ompo”

- Kalau CCTV dimana saja Pak?

“Didalam kota dan SKPD. Jadi ada di Mes tinggi Villa Yuliana, ada 2 juga yang mengarah ke lapangan gasis toh?. Ada juga ditempat-tempat pelayanan tadi kan? Di rumah sakit, pemadam kebakaran, PSC, ambulans. Semua ada CCTV di kantor Dinas Sosial untuk pelayanan kartu macca. Pokoknya 16 CCTV itu sudah ada di Soppeng. Jadi kita tambah ke depan nanti, ada termasuk di SMA juga ada. Di SMA 1 ada, kita harapkan nanti jalur ini ada CCTV begitu masuk di pintu gerbang Lollo'e sudah terpantau. Begitu kondisinya sekarang, jadi bertahap dana yang ada tapi dimanfaatkan secara maksimal”

Narasumber 3

Bapak I selaku operator komputer bidang administrasi pemerintah

- Bagaimana pelaksanaan *online service* di bidang pemerintah dan otonomi daerah Kabupaten Soppeng ?

“Kalau terkait pelaksanaan *online service* itu sekarang sudah bagusmi karena kan yang pelayanan *online service* dibagian Kominfo kaya’nya itu. Disitu sudah di, apa lagi namanya, sudah posting semua di website pemerintah kalau terkait pelayanan online”.

“Online servicenya sementara proses sekarang. Jadi untuk sementara masih kek manual gitu, nama kegiatannya PATEN”.

- Bagaimana pelaksanaan *open government* di bidang pemerintah dan otonomi daerah Kabupaten Soppeng ?

“Kalau yang terkait dengan pelaksanaan *open government* tiap tahun itu dibagian pemerintah daerah buat laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah dan itu di publikasikan di kaya’ dirilis dikoran-koran begitu. Semua tentang disitu tentang informasi pencapaian. Begitu ji”.

Narasumber 4

Bapak WS selaku pegawai bidang perbendaharaan kantor BPKD Soppeng

- Bagaimana pelaksanaan *online service* dan *open government* di BPKD Kabupaten Soppeng?

“Kalau di BKPD Soppeng eee apa namanya dia tidak terbuka juga kalau untuk ke masyarakatnya tapi kalau untuk sesama lingkungan SKPD Soppeng ee terbuka. Itu untuk BPKD, tidak tau yang lain”.

“Karena yang dikelola BPKD itu adalah aplikasi sistem aplikasi keuangan berbasis online tapi hanya beberapa orang yang bisa lihat akses itu untuk itu keuangan tapi kalau untuk pelayanan publik dia terbuka untuk sesama SKPDnya saja”

Narasumber 5

Bapak SH selaku Staf DPMPTSP Kabupaten Soppeng

- Apa sebenarnya itu aplikasi LaSide?

“Itu aplikasi LaSide yaitu layanan sistem informasi data dan eletronik itu adalah singkatan dari LaSide.”

- Seperti apa layanan yang dapat diperoleh dari aplikasi LaSide?

“Kalau aplikasi LaSide itu artinya selain kita bisa melihat status berkas, kita juga bisa melihat persyaratan – persyaratan perizinan, kita juga bisa cek beberapa retribusi kalau dikenakan retribusi, kan disini tidak semuanya” dikenakan retribusi, hanya ada izin-izin tertentu Perda No. 6 tentang retribusi ee apalagi perizinan tertentu. ee artinya kan sekarang yang dikenakan retribusi hanya IMD, izin proyek dengan izin perikanan. Jadi,

kita bisa lihat disitu ee anunya apa, kita bisa melakukan menghitung pembayaran disitu. Umpa IMD sekian, otomatis kita bisa lihat sekian pembayaran saya. Kemudian kita juga bisa lihat persyaratan perizinan, ada juga persyaratan perizinan”

- Perizinan apa saja itu Pak ?

“Semua eee semua perizinan yang dikelolah DPMDPST kita bisa lihat disitu persyaratannya dan kalau memang masyarakat membutuhkan eee permohonan dia bisa langsung download disitu permohonan formulirnya.”

- Langkah selanjutnya setelah di download?

“kalau kita sudah download kita bisa langsung cetak saja langsung dibawa kesini diproses. kan dipersyaratkan itu sudah ada juga, eh permohonan itu sudah ada persyaratannya disitu. Kemudian eee kita bisa juga melakukan pengaduan disitu. Pengaduan tentang perizinan. Umpamanya perizinan apakah terlambat bagaimana. Kemudian kita bisa masuk di website, kemudian cek status berkas. Kemudian mengetahui rekapitulasi tahunan, laporan, SOP, perizinan kana da semua. Jadi, caranya nanti kita masuk di aplikasi LaSide, masuk di palystore, kemudian diketik La spasi side dan kitakan langsung download disitu.”

- Sejauh mana aplikasi ini dijalankan oleh masyarakat? mungkin ada data sudah berapa kali diunduh?

“Kami belum bisa pastikan sekian masyarakat yang jelas kami sudah sosialisasikan ke masyarakat bahwa ada aplikasi ini. kan ini aplikasi ini kita nyatakan baru.”

- Sejak kapan di *Launching* aplikasi ini ?

Tahun ini, tahun kemarin 2017 akhir.

- Sudah ada tanggapan dari masyarakat ?

“Kalau masyarakat itu kan ini artinya sudah sering, oh kalau persyaratannya itu sudah di aplikasi LaSide jadi biasa juga masyarakat.”

- Sudah ada masyarakat yang pernah menggunakan ?

“Iya ada. Karena baru baru ini saya ke ee Cendrana, kan ada surat izin, dia katakan sama saya. Bagaimana izin saya ? saya sudah anu. Saya bilang silahkan ambil sudah jadi.”

- Sejauh ini, ada kendala yang ditemukan?

“Kendala itu hanya kan sering karena faktor jaringan saja. Karena kan kita disini sering itu apa jaringan internetnya sering terputus penguploadannya data sering terhambat juga karena harus di upload setiap hari. Karena kalau tidak diupload untuk hari ini otomatis kita tidak bisa liat bagaimana status berkas karena aplikasi ini berhubungan juga diluar. Di loket. Bukan, dipendaftaran. Artinya kan kalau sudah masuk otomatis nanti kalau umpanya jam 12 kita upload lagi. Itumi kendalanya sekarang. Kendalanya karena eee pertama itukan mengenai jaringan, lalod juga sering kalau kita tiap hari mengupload lebih 1000 data. Server ini.”

- Tapi kelebihanannya Pak, yang menonjol?

“Artinya pertama masyarakat kan sudah bisa melihat datanya disitu, bisa mengambil permohonannya. Dia bisa juga mengecek berkasnya. Dia juga bisa apa melakukan pengaduan. Kalau memang ada yang mau dia adukan disitu.”

- Mungkin itu saja Pak, yang ingin saya tanyakan.

“Iye. Karena ini aplikasi masih baru.”

- iye iye. itumi karena mau dicari tau sejauh mana tanggapan masyarakat belum bisa terukur.

“Artinya nanti kita kan disini selalu melakukan SKN (survey kepuasan masyarakat).”

- Oh ini Pak, mengenai sosialisasinya sejauh mana telah dilakukan ?

“Sosialisasi ini dilakukan pada bulan 8 kemarin. Kami mengangkat ini aplikasi bahwa ee artinya untuk memudahkan masyarakat dalam hal pengurusan perizinan ee masyarakat bisa langsung download saja di aplikasi LaSide di playstore. Inilah visi misinya di DPMPTSP.”

- Dengan cara apa itu Pak sosialisasinya? apakah masyarakat yang datang disini saja yang diberitau?

“kan kita pernah keluar ke kantor desa/lurah. Baru 2 desa yang di coba-coba. Baru Desa Citta sama Desa Pattojo. Kebetulan kita disitu coba.”

Narasumber 6

Bapak RH selaku Operator konsol DPPKAD Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Asli Daerah

- Terkait dengan *smart government*, tentang layanan aplikasi PADDARE? Apa sebenarnya aplikasi PADDARE itu Pak ?

“Itu aplikasi PADDARE sebenarnya aplikasi berbasis android toh ? untuk informasi di masyarakat. Dia lebih banyak materinya di PBB penjamin bangunan jadi kalau misalnya wajib pajak mau tau berapa pajaknya tahun ini, bisa di cek disitu di aplikasi.”

- Caranya bagaimana Pak? di buka langsung?

“Dibuka langsung, sisa masukkan langsung nomor bio pajaknya muculmi data-datanya semua.”

- Terus penggunaanya itu bagaimana? apakah semua wajib pajak sudah terdaftar disitu?

“Yah. semua yang terdaftar disini bisa dilihat semua disitu.”

- Berarti nomor yang dimiliki wajib pajak sudah bisa langsung diakses? berapa pajak yang misalnya akan dibayar tahun ini.

“Iyye. sudah bisa. teruskan ada juga pelayanan disini. Eeee, misalnya kalau mau balik nama atau pemecahan tanah kan bisa dipecah PBBnya, bisa di download langsung formulirnya disitu. tidak langsungmi kesini ambil formulir. Di download formulir baru diisi baru dibawa kesini. lengkap mi semua persyaratnya.”

- Kalau pembayarannya itu, dimana?

“Kalau pembayarannya ada 8 (Delapan) loket setiap kecamatan belumpi melalui aplikasi.”

- Melampirkan itu formulir?

“Tidak kalau mau anu misalnya kalau ada transaksi jual beli, otomatisakan wajib pajaknya terganti. Wajib pajak juga harus bermohon untuk itu.”

- Cuma PBB saja yang bisa?

“Iya PBB. kalau wajib pajak yang lain kan, tidak adaji istilah balik nama bagaimana. Itu-itu terusji. Kalau berapa besarnya yang dibayar kan wajib pajak saja yang tau karena mereka yang tulis sendiri. Bukan kita.”

- Sejauh ini Pak, sudah berapa orang yang mengakses atau menggunakan aplikasi itu?

“Tidak adaaaa. desarissengngi. Hehe”

- Biasanya itu server yang mengetahui sekian
“Nda adaji. Apa istilahnya, bisaji kapan diliat di playstore.”

- Kapan mulai ?

“Baru tahun ini mulai sejak 2018. 2017 di launching tapi sementara pengembangan.”

- Sosialisasinya ke masyarakat ?

“Kalau kemarin sebatas anuji. Pernah diperkenalkan di bursa-bursa lapangan gasis toh kita ikutkan juga disitu. kana da inovasi-inovasi setiap instansi. Cuma kalau yang bersentuhan langsung dengan masyarakat LaSide dan Paddare kalau yang lain hanya sebatas internal.”

- Tidak ada data yang selama ini menggunakan aplikasi?

“Tidak ada.”

- Kendala apa yang sering muncul Pak? misalnya kalau orang mau unduh formulir

“Paling kalau dari jaringanji. Tapi kalau jaringan kan, selama akses internet sampai ke server masuk itu bisa, lancar terusji ini. Selama speede tidak bermasalah.”

- Jadi, sudah ada tanggapan dari masyarakat?

“Belum ada. kan baru tahun ini. Hanya kalau ada sosialisasi biasa kita sampaikan juga disini. Cuma masyarakat disinikan tidak terlalu, misalnya masalah PBB. PBB kan biasanya yang lebih perlu kan orang-orang tua ji”

- Artinya masyarakat masin cenderung menggunakan cara-cara yang lama?

“Iyaa... karena mereka biasanya datang konsultasi langsung disini.”

Bapak JA selaku Operator program Kartu Macca oleh Dinas Sosial

- Bagaimana fungsi dan tujuan program kartu Macca?

“Fungsi dan tujuan program kartu Macca ini kan ini program pemerintah. Fungsinya dia memiliki fungsi sebagai ee saya ambil contohnya saja di? saya ambil bibit gratis, bastra bantuan beras raskin, dia bisa ee apa bantuan pendidikan sama pelayanan-pelayanan kesehatan, pelayanan di transduk, dengan kartu macca ini dia bisa langsung dilayani tanpa antri. Khusus untuk yang memiliki kartu macca.”

- Siapa yang berhak mendapatkan kartu macca?

“Ini masih diperuntukkan untuk yang menerima bantuan bastra.”

- Kalau bantuan yang lain?

“Kalau bantuan yang lain itu masih diprioritaskan untuk penerima bastra jadi ini masih bertahap. Harapannya masih ada untuk yang bagian umum untuk diajukan menerima kartu macca.”

- Berapa macam memang masyarakat yang bisa menerima kartu macca? yang bagaimana?

“Yang pertama itu, orang yang kurang mampu sama yang rentang miski.”

- Jadi masyarakat yang kurang mampu itu dalam kategori apa?

“Kurang mampu itu dalam kategori kurang dari segi penghasilan sama ada yang Cuma numpang dirumah orang. Kalau yang rentang miskin ini dia ada pekerjaan tapi tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari.”

- Apakah program ini khusus untuk warga Kabupaten Soppeng saja ?

“Iya, Khusus yang berKTP Soppeng.”

- Terus ada saya lihat websitenya. Apa tujuannya website?

“Itu websitenya untuk siapa tau ada pengaduan masyarakat ada temuan disana mungkin dia layak dapat kartu macca tapi tidak ada di desa.”

- Apakah masyarakat umum bisa mengakses kartu macca? atau pemilik kartu macca saja yang bisa mengakses?

“Ya, masyarakat umum bisa.”

- Tapi khusus pemegang kartu ada layanan khusus disediakan di website ?

“eee khusus yang pemegang kartu bisa langsung ke kantor mendaftar. Kan diharapkan itu pemegang kartu setiap ada perubahan dalam susunan KK diharapkan ke kantor update datanya. Misalkan yaa ada kepala keluarganya yang meninggal, kan di kartu itu yang tercetak atas nama kepala keluarga jadi otomatis kalau meninggal kepala keluarganya harus di update ulang. Kartu macca itu kan Cuma satu nama yang di kartu tapi didalamnya sudah tertera semua anggota keluarganya.”

- Kalau misalkan bantuan sudah ada. Bagaimana caranya masyarakat dapat memperoleh? apakah hanya memperlihatkan kartu saja atau bagaimana?

“Untuk penerimaan bantuannya itu cukup untuk memperlihatkan saja kartu maccanya langsung di bidang yang berhubungan dengan pelaksana yang tadi.”

- Sebenarnya ee kan tadi ada beberapa didalam kartu maca itu, pemberian bantuan raskin, bastra, kesehatan, ada hukum. Apakah seorang pemegang kartu macca ini mendapatkan semua itu? atau hanya 1 bagian saja?

“Setiap yang ada namanya dalam kartu keluarga itu berhak mendapatkan semuanya.”

- Informasi apa saja yang bisa diperoleh dari website?

“Didalam websitenya itu ada fungsinya, alurnya bagaimana untuk mendapatkan kartunya mendapatkan bantuannya”

- Penyaluran bantuannya setiap berapa kali, berapa banyak? Misalkan rastra itu?

“Kalau rastra penyalurannya setiap bulan jumlahnya sekarang 10 kg per keluarga yang di drop ke desa. Desanya yang bagikan ada juga datang langsung yang ambil cukup dengan kartunya yang diperlihatkan.”

- Jadi fungsi utama dari kartu macca ini ?

“Untuk memaksimalkan yang berhak menerima bantuan tepat sasaran.”

- Sudah berapa lama berjalan ?

“Ini sudah mulai drai tahuun, pencetakannya mulai dari tahun 2017. Disalurkan juga tahun 2017”

- Berapa kuotanya untuk kartu macca?

“Untuk kuotanya itu ada 13.161 yang sudah tercetak itu sudah 12.825. Ini kuota tadinya 13.161”

- Berarti masih ada yang belum tersalurkan ?

“Iya masih ada yang belum. Mungkin dari aparat desanya nanti yang kasi naik berkasnya disini nanti dia yang bagikan ke penerimanya karena biasa itu ada yang tidak sama kepala keluarganya.”

- Berarti pendataan dilakukan oleh mereka Pak?

“Iya. Tapi dasar datanya ini dari pusat.”

- Bagaimana itu Pak kartunya? Dengar-dengar bisa masuk di ATM ?

“Tidak bisa. Kartu to.”

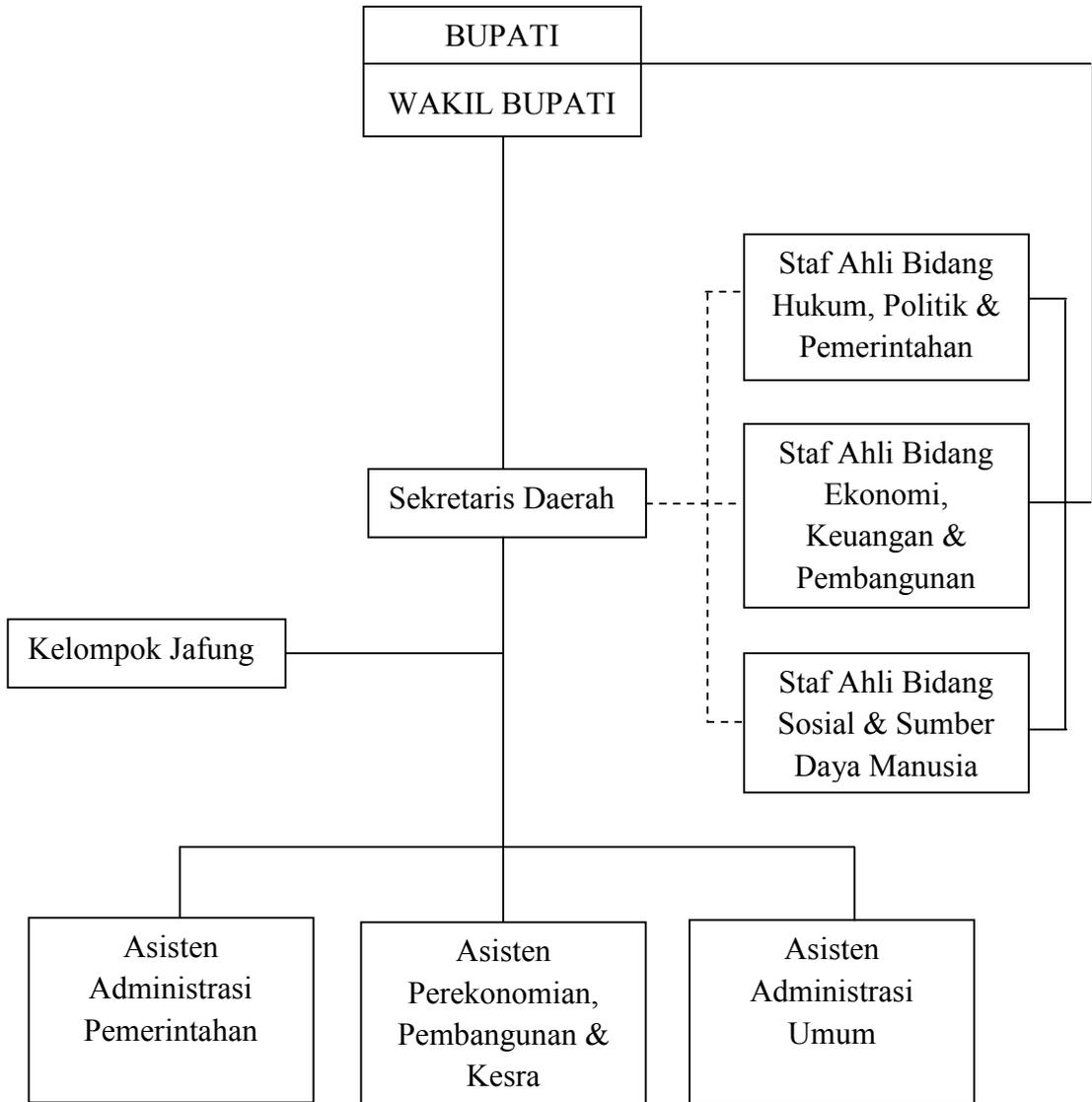
- Kalau layanan untuk pendidikan. Misalnya dalam 1 keluarga ada berapa anak yang ditanggung?

“Kalau untuk bantuan pendidikannya itu, sama yang berprestasi dan yang kurang mampu. Semua anak yang ada dalam kartu keluarga.”

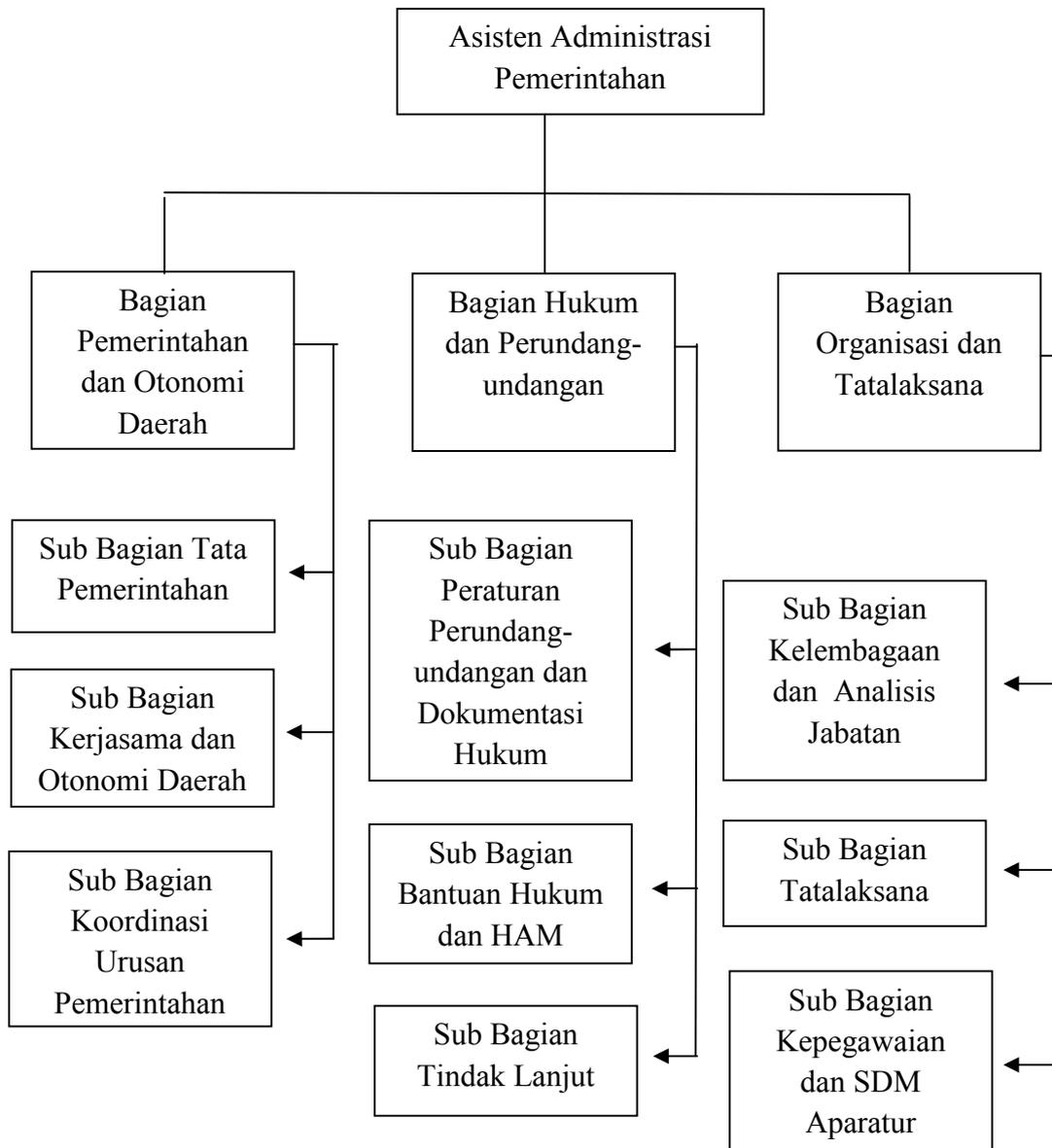
Struktur Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

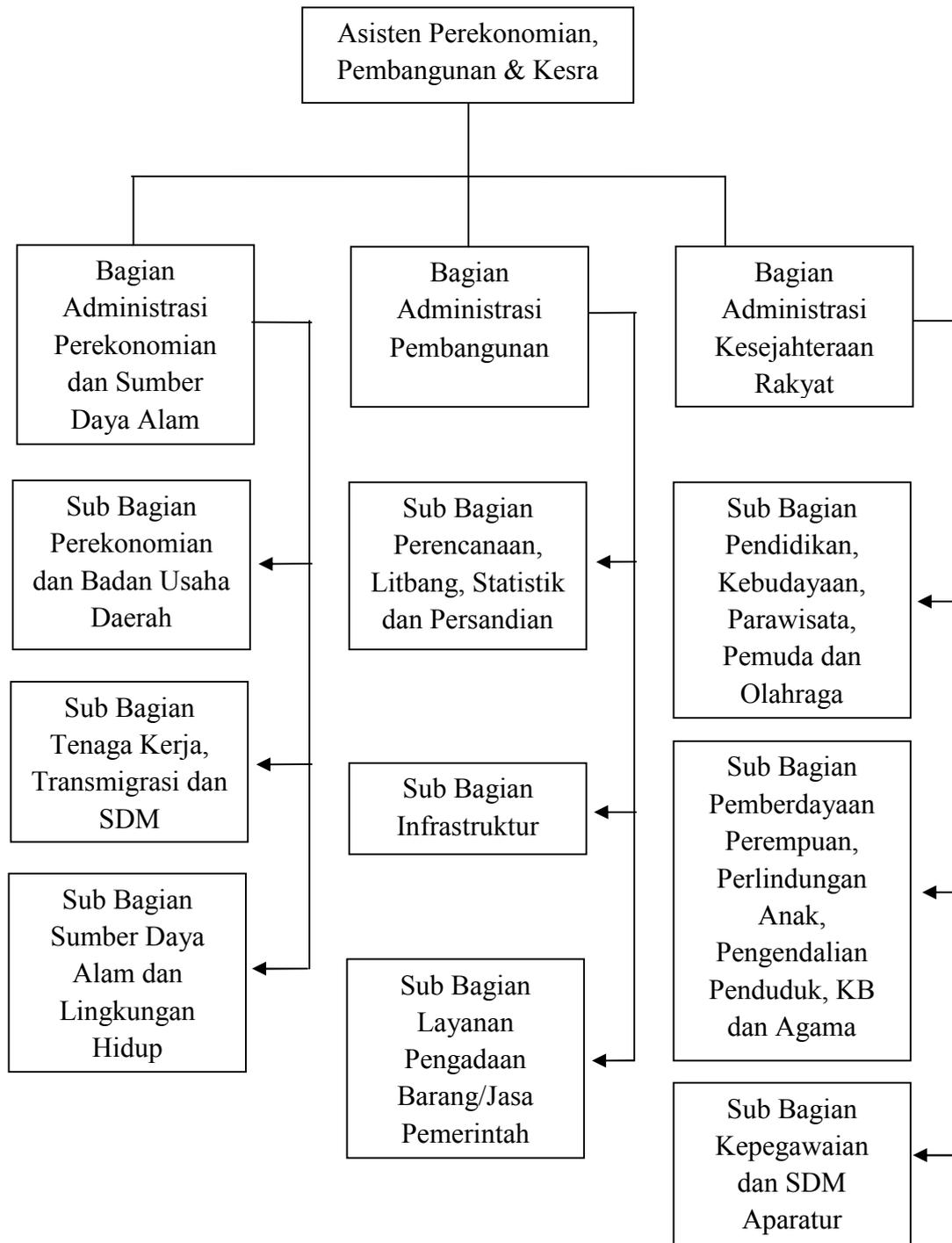
KABUPATEN SOPPENG



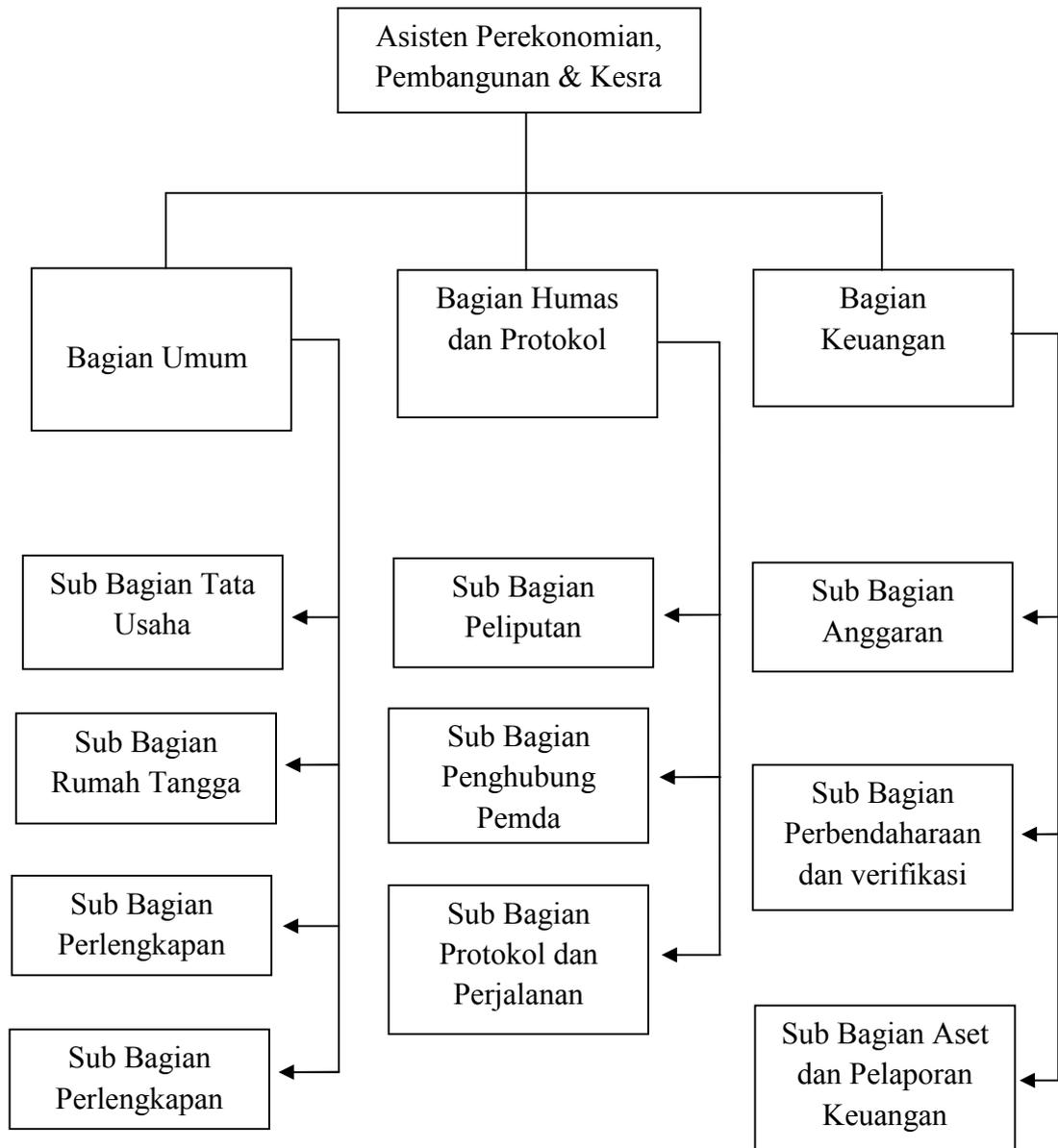
Struktur Asisten Administrasi Pemerintahan



Asisten Perekonomian, Pembangunan & Kesra



Asisten Administrasi Umum





SRN CO0002935

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Salotungo No. 2 Tlp. 0484 - 23743 Watansoppeng 90812

IZIN PENELITIAN

Nomor : 299/IP/DPM-PTSP/VII/2018

DASAR 1. Surat Permohonan **IRFAN** Tanggal **30-07-2018**
2. Rekomendasi dari **BAPPELITBANGDA**
Nomor **300/IP/REK-T.TEKNIS/BAP/VII/2018** Tanggal **31-07-2018**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **IRFAN**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **UNISMUH MAKASSAR**

Jurusan : **ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

ALAMAT : **CANGKANG KEL. UJUNG KEC. LILIRILAU**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Soppeng dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PELAKSANAAN SMART GOVERNMENT DI KABUPATEN SOPPENG**

LOKASI PENELITIAN : **KANTOR BUPATI SOPPENG DAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SOPPENG**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **01 Agustus 2018 s.d 01 September 2018**

- Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Ditetapkan di : Watansoppeng

Pada Tanggal : 31-07-2018

an. BUPATI SOPPENG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SOPPENG



FIRMAN, SP, MM

Pangkat : **PEMBINA**

NIP : **19621012 198603 1 027**

Biaya : Rp. 0,00



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. SALOTUNGO NO. TELP. (0484) 21619 WATANSOPPENG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 798/KDS/IX/2018

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. A. TENRI SESSU, M.Si
Nip : 19640528 199103 1 009
Pangkat : Pembina Utama Madya
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng.

menerangkan bahwa :

Nama : IRFAN
Nim : 10561 04988 14
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

telah melaksanakan penelitian dengan judul :

"PELAKSANAAN SMART GOVERNMENT DI KABUPATEN SOPPENG"

Mulai tanggal 01 Agustus 2018 s/d 01 September 2018.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. BUPATI SOPPENG
Sekretaris Daerah,



Drs. H. A. TENRI SESSU, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19640528 199103 1 009

Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Program Strata Satu Universitas Muhammadiyah Makassar;
2. *Arsip.*



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**Alamat : Kantor Bupati Soppeng Jln. Salatung. No. ... Telp/Fax. (0484) 23018,
Email : diskominfo@soppengkab.go.id Watansoppeng, 90812**

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 173/DISKOMINFO/IX/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ILHAM, S.Sos
NIP. : 19630419 198512 1 002
Pangkat / Gol : Pembina Tk.I, IV-b
Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : IRFAN
Alamat : Cangkang Kel.Ujung Kec.Lilirilau
Universitas : Unismuh Makassar
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Berdasarkan Surat Izin Penelitian Nomor : 299/IP/DPM-PTSP/VII/2018 tanggal 31-07-2018 telah melaksanakan penelitian/pengambilan data/interview di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan digunakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Watansoppeng, 17 September 2018

An. Kepala Dinas
Sekretaris



ILHAM, S.Sos

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19630419 198512 1 002

Tembusan, Yth.

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM di Watansoppeng
2. Arsip

Lampiran 5

Dokumentasi Kegiatan Wawancara



Wawancara dengan Bupati
Kabupaten Soppeng



Wawancara dengan kepala
dinas Kominfo Kabupaten
Soppeng



Wawancara dengan staf
DPMPTSP Kabupaten Soppeng



Wawancara dengan operator
konsol DPPKAD Kabupaten
Soppeng



Wawancara dengan operator Kartu Macca
Dinas Sosial Kabupaten Soppeng

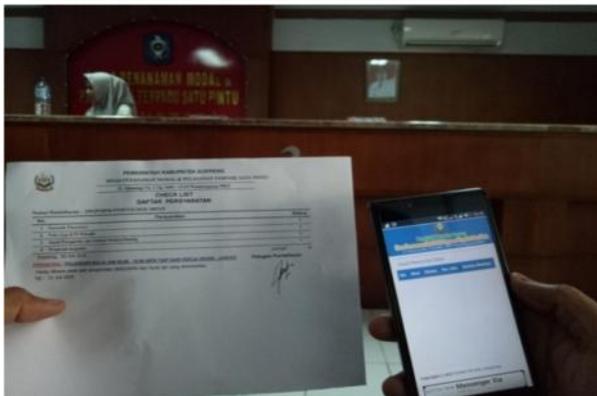
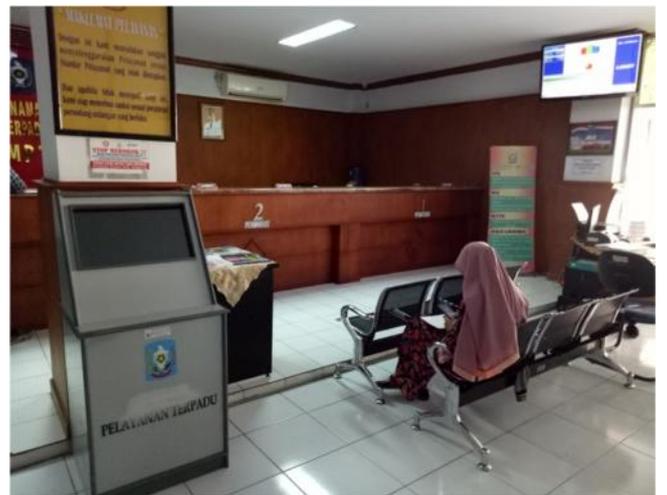
Dokumentasi Observasi

Observasi *Soppeng Command Center (SCC)*



Ruang SCC (Soppeng Command Centre)

Observasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)



Observasi Dinas Komunikasi dan Informatika



Halaman samping kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng

Obsesrvasi laman website SKPD Kabupaten Soppeng



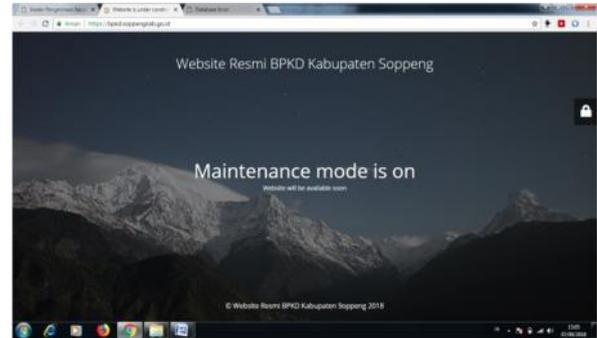
Website resmi Pemerintah Kabupaten Soppeng, soppengkab.co.id



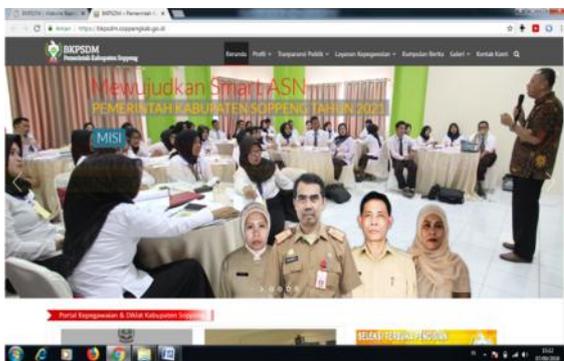
Website resmi Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng, inspektorat.soppengkab.co.id



Website resmi Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan Pembangunan Daerah Soppeng, bappelitbangda.soppengkab.co.id



Website resmi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng, bpkd.soppengkab.co.id



Website resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Soppeng, bkpsdm.soppengkab.co.id



Website resmi Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng, disdik.soppengkab.co.id



Website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, disdukcapil.soppengkab.co.id



Website resmi Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng, disnakertrans.soppengkab.co.id



Website resmi Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng, distan.soppengkab.co.id



Website resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng, dpmptsp.soppengkab.co.id



Website resmi Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, lalabata.soppengkab.co.id



Website resmi Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng, liliraja.soppengkab.co.id



Website resmi Kecamatan Lilirilau
Kabupaten Soppeng,
lilirilau.soppengkab.co.id



Website resmi Kecamatan Marioriwawo
Kabupaten Soppeng,
marioriwawo.soppengkab.co.id



Website resmi Kecamatan Marioriawa
Kabupaten Soppeng,
marioriawa.soppengkab.co.id



Website resmi Kecamatan Donri-Donri
Kabupaten Soppeng,
donridonri.soppengkab.co.id



Website resmi Kecamatan Ganra
Kabupaten Soppeng,
ganra.soppengkab.co.id



Website resmi Kecamatan Citta
Kabupaten Soppeng,
citta.soppengkab.co.id



Website resmi dinas Kominfo Kabupaten Soppeng, ppid.soppengkab.co.id

Observasi Layanan-Layanan Aplikasi Pemerintah Kabupaten Soppeng dan SKPD



Akun aplikasi Instagram resmi pemerintah daerah Kabupaten Soppeng



Aplikasi La SIDE yang di jalankan oleh dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



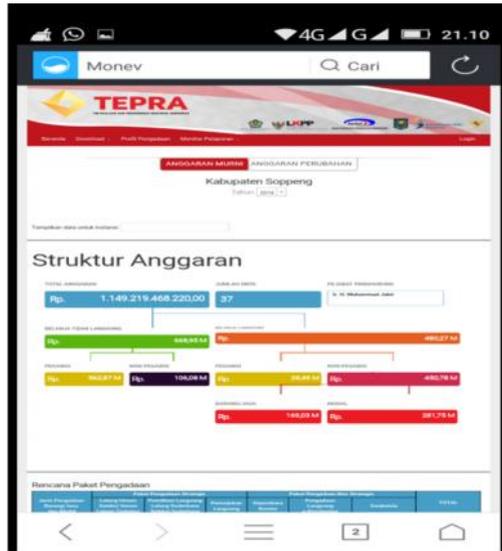
Aplikasi PADDARE yang di jalankan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng



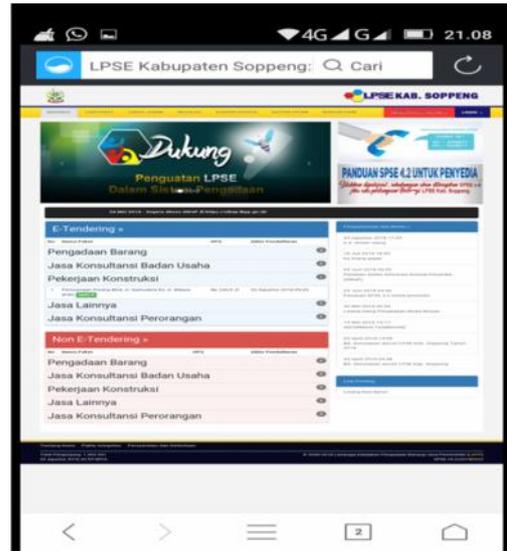
Aplikasi SIA (Sistem Informasi Absensi Soppeng yang di jalankan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Soppeng



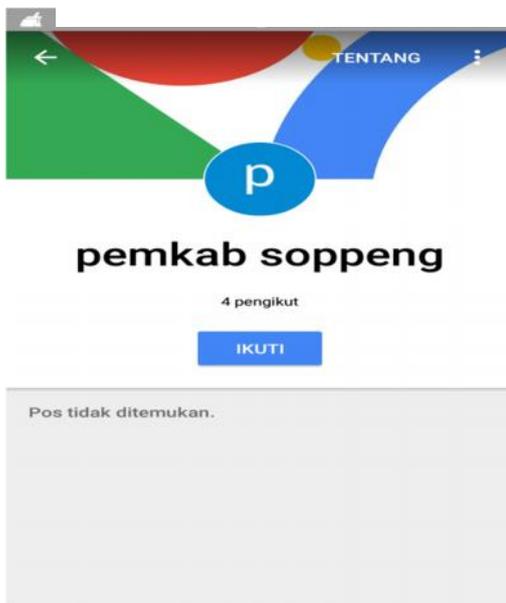
Tampilan aplikasi yang ada pada SKPD Kabupaten Soppeng versi android



Aplikasi Tric Soppeng yang di jalankan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng



Aplikasi Tric Soppeng yang di jalankan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Soppeng



Akun Google Plus resmi pemerintah daerah Kabupaten Soppeng



Aplikasi SIMPEG Soppeng yang dijalankan oleh BKPSDM Kabupaten Soppeng



Aplikasi Statistik BPS Soppeng



Akun media sosial Facebook
Pemerintah daerah Kabupaten
Soppeng



Akun media sosial Twiter resmi
pemerintah daerah Kabupaten
Soppeng



Akun Youtube pemerintah daerah
Kabupaten Soppeng